

**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/
*and its subsidiaries***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 Desember 2020 dan 2019/
*December 31, 2020 and 2019***

PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries

Daftar isi/Contents

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi/*Directors' Statement of Responsibility*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019/
Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2020 and 2019:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>	6-55

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAS
TANGGUNG JAWAB UNTUK LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**THE DIRECTORS' STATEMENT
OF THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

**PT VALE INDONESIA Tbk
dan entitas anaknyaland its subsidiaries**

Atas nama Direksi, kami, yang bertanda tangan
di bawah ini:

*On behalf of the Board of Directors,
we, the undersigned:*

1.	Nama	Nicolas D. Kanter	Name
	Alamat Kantor	The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cikatomas II No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Telepon Kantor	+62 21 524 9002/524 9000	Office Telephone
	Jabatan	Presiden Direktur/President Director	Position
2.	Nama	Bernardus Irmanto	Name
	Alamat Kantor	The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cilandak I No. 30 Kav. 17 Cilandak Barat Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Telepon Kantor	+62 21 524 9002/524 9000	Office Telephone
	Jabatan	Direktur/Director	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan") dan entitas anaknya (bersama-sama disebut "Grup"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company") and its subsidiaries (together as the "Group"); |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Pengungkapan yang telah kami buat dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah lengkap dan akurat;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup; | 3. a. The disclosures we have made in the Group's consolidated financial statements are complete and accurate;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any information or facts that would be material to the Group's consolidated financial statements; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal Grup. | 4. We are responsible for the Group's internal control. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 25 Februari 2021/February 25, 2021

Presiden Direktur/President Director

Direktur/Director

 (Nicolas D. Kanter)		 (Bernardus Irmanto)
--	--	--



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT VALE INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA

25 Februari/February 2021

Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0226

**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AT DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	388,682	249,035	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	7	60,040	107,295	- Related parties
Persediaan	9	144,487	147,961	Inventories
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		34,268	6,988	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		62,056	71,172	- Other taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	10	3,927	3,108	Prepayments and advances
Aset keuangan lancar lainnya	8	2,512	2,754	Other current financial assets
Jumlah aset lancar		695,972	588,313	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	30,612	15,412	Restricted cash
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		2,229	29,146	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		102,360	117,674	- Other taxes
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	32e	18	58	- Related parties
Aset tetap	11, 12	1,479,146	1,467,462	Fixed assets
Aset keuangan tidak lancar lainnya	8	4,321	4,623	Other non-current financial assets
Jumlah aset tidak lancar		1,618,686	1,634,375	Total non-current assets
JUMLAH ASET		2,314,658	2,222,688	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Vale Indonesia Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AT DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	13			Trade payables
- Pihak-pihak berelasi		140	2,071	- Related parties
- Pihak ketiga		112,955	95,337	- Third parties
Akrual	15	22,105	16,327	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17	20,465	15,563	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	14b			Taxes payable
- Pajak lainnya		1,793	1,774	- Other taxes
Liabilitas sewa	11	66	947	Lease liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham		788	780	Share-based payment liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	16	2,398	3,753	Other current financial liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		160,710	136,552	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	18	26,786	19,419	Long-term post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	14d	50,171	80,490	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa	11	-	173	Lease liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	27	56,603	44,361	Provision for asset retirement
Jumlah liabilitas jangka panjang		133,560	144,443	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		294,270	280,995	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
- Modal dasar - 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019				- Authorised capital - 39,745,354,880 shares with par value IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2020 and December 31, 2019
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	19	136,413	136,413	- Issued and fully paid capital - 9,936,338,720 shares as at December 31, 2020 and December 31, 2019
Tambahan modal disetor	21	277,760	277,760	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
- Dicadangkan	22	27,283	27,283	- Appropriated
- Belum dicadangkan		1,578,922	1,500,237	- Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2,020,378	1,941,693	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		10	-	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		2,020,388	1,941,693	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,314,658	2,222,688	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
Pendapatan	32a	764,744	782,012	Revenue
Beban pokok pendapatan	23	(640,365)	(664,323)	Cost of revenue
LABA BRUTO		124,379	117,689	GROSS PROFIT
Beban usaha	24	(7,385)	(13,730)	Operating expenses
Pendapatan lainnya	25	7,102	3,266	Other income
Beban lainnya	26	(20,242)	(17,701)	Other expenses
LABA USAHA		103,854	89,524	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		4,472	4,759	Finance income
Biaya keuangan	33	(3,681)	(5,147)	Finance costs
PENDAPATAN/(BIAYA) KEUANGAN, BERSIH		791	(388)	NET FINANCE INCOME/(COSTS)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		104,645	89,136	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	14c	(21,826)	(31,736)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		82,819	57,400	PROFIT FOR THE YEAR
(KERUGIAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Perubahan yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari liabilitas imbalan pascakerja	18	(5,301)	755	- Changes resulting from actuarial remeasurement of post- employment benefit liabilities
- Pajak penghasilan terkait (kerugian)/ penghasilan komprehensif lain	14d	1,167	(189)	- Income tax on other comprehensive (loss)/income
TOTAL (KERUGIAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		(4,134)	566	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		78,685	57,966	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		82,819	57,400	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		-	-	Non-controlling interest
		82,819	57,400	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		78,685	57,966	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		-	-	Non-controlling interest
		78,685	57,966	
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
- Dasar dan dilusian (dalam nilai penuh Dolar AS)	30	0.0083	0.0058	- Basic and diluted (in full amount of US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

**Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/
Equity attributable to owners of the parent entity**

	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Tambahkan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	<u>Saldo laba/Retained earnings</u>		Kepentingan nonpengendali/ <i>non-controlling interest</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>
			Dicadangkan/ <i>Appropriated</i>	Belum dicadangkan/ <i>Unappropriated</i>		
Saldo 1 Januari 2019	136,413	277,760	27,283	1,442,271	-	1,883,727
Laba komprehensif 2019						
Laba	-	-	-	57,400	-	57,400
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	566	-	566
Saldo 31 Desember 2019	136,413	277,760	27,283	1,500,237	-	1,941,693
						Balance as at January 1, 2019
						Comprehensive income 2019
Laba	-	-	-	82,819	-	82,819
Kerugian komprehensif lain	-	-	-	(4,134)	-	(4,134)
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	10	10
Saldo 31 Desember 2020	136,413	277,760	27,283	1,578,922	10	2,020,388
						Balance as at December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		811,999	798,965	Receipts from customers
Pembayaran kas ke pemasok		(377,733)	(441,062)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan badan		(42,193)	(70,616)	Payments of corporate income tax
Pembayaran pajak lainnya		(41,430)	(50,899)	Payments of other taxes
Penerimaan restitusi pajak		56,045	23,808	Receipts of tax refunds
Pembayaran ke karyawan		(74,491)	(86,216)	Payments to employees
Penempatan jaminan keuangan		(21,664)	(14,486)	Placement of financial guarantee
Penarikan jaminan keuangan		6,464	13,419	Withdrawal of financial guarantee
Penerimaan pendapatan keuangan		4,472	4,759	Receipts of finance income
Pembayaran royalti dan retribusi		(29,092)	(39,678)	Payments of royalties and levies
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi		292,377	137,994	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran untuk pembelian aset tetap		(152,149)	(166,560)	Payments for acquisition of fixed assets
Penerimaan hasil penjualan aset tetap		1,312	456	Proceeds from disposal of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(150,837)	(166,104)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	6	-	(3,902)	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	6	-	19,509	Withdrawal of restricted cash
Pembayaran pinjaman jangka panjang		-	(37,500)	Payments of long-term borrowings
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		10	-	Stock subscription from non-controlling interest
Pembayaran liabilitas sewa		(1,512)	(1,245)	Payments of lease liabilities
Pembayaran beban keuangan		(174)	(1,253)	Payments of finance costs
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(1,676)	(24,391)	Net cash flows used in financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas		139,864	(52,501)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		249,035	301,153	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas		(217)	383	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun		388,682	249,035	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan antara lain dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, akta No. 14 tanggal 4 April 2018 dan akta No. 37 tanggal 13 September 2019, yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 4 April 2018 dan RUPSLB pada tanggal 16 Agustus 2019. Perubahan dalam akta No.121 tanggal 29 Juni 2015 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 serta telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, sedangkan perubahan dalam akta No. 14 tanggal 4 April 2018 dan No. 37 tanggal 13 September 2019 masing-masing telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0135774 tanggal 5 April 2018 dan Surat Keputusan No. AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019. Perubahan terakhir dengan akta No. 175 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam RUPST pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0381902 tanggal 3 September 2020.

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited ("VCL") dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Gedung The Energy, Lt. 31, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Hak Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi didasarkan atas Kontrak Karya ("KK") yang ditandatangani pada 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan, yang kemudian diubah dan diperpanjang pada 15 Januari 1996, dan terakhir diamandemen pada 17 Oktober 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 ("KK 2014").

Berdasarkan ketentuan KK 2014, KK Perseroan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perseroan dapat mengajukan untuk melanjutkan operasinya dalam bentuk izin usaha untuk jangka waktu perpanjangan dua kali sepuluh tahun, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah.

Selain itu, KK 2014 juga mengatur mengenai komitmen Perseroan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri, serta mengenai komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan (lihat Catatan 38d mengenai komitmen investasi Perseroan).

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano (yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona), memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya untuk aset tetap PLTA dan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar untuk aset lainnya, dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan pada Keputusan Pemerintah tahun 1975 tersebut.

1. General

PT Vale Indonesia Tbk, (the "Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary of Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times, among others, by deed No. 121, dated June 29, 2015, deed No. 14, dated April 4, 2018, and deed No. 37, dated September 13, 2019, all drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary of Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on June 29, 2015, in the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on April 4, 2018 and in the EGMS on August 16, 2019, respectively. The amendment in deed No. 121, dated June 29, 2015 was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015, while the amendment in deeds No. 14 dated April 4, 2018 and No. 37 dated September 13, 2019, each has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0135774 dated April 5, 2018 and decision letter No. AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019 dated October 9, 2019, respectively. The latest amendment made by deed No. 175 dated July 29, 2020 drawn up before Aulia Taufani S.H., a public notary of Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the AGMS on July 29, 2020 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. No.AHU-AH.01.03-0381902 dated September 3, 2020.

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited ("VCL") and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in The Energy Building, 31st floor, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

The Company's right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi was granted pursuant to a Contract of Work ("CoW") dated July 27, 1968 entered into between the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") and the Company, which was modified and extended on January 15, 1996, and was later amended on October 17, 2014 as required by the 2009 Mining Law ("the 2014 CoW").

Under the terms of the 2014 CoW, the Company's CoW is set to expire in 2025 and the Company may apply to continue its operations by way of a business license for a period of two consecutive ten-year extensions upon approval of the Government.

Furthermore, the 2014 CoW reflects the Company's commitment to prioritise domestic manpower, goods and services and outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy (refer to Note 38d about the Company's investment commitments).

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants (which are additions to the original Larona facility), provides the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been received to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value for hydroelectric fixed assets and lower of cost or market price for other assets, under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on a formula stated in the Governmental Decree of 1975.

1. Umum (lanjutan)

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham biasa atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

Perseroan mengadakan RUPST pada 29 Juli 2020 yang menyetujui antara lain, pengangkatan kembali Nicolas D. Kanter sebagai Presiden Direktur untuk masa jabatan satu tahun, efektif sejak penutupan RUPST 2020 sampai dengan penutupan RUPST 2021.

Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Mahendra Siregar sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen dan pengangkatan Rudiantara sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Mark James Travers sebagai Presiden Komisaris, Luiz Fernando Landeiro, Cory McPhee dan Nobuhiro Matsumoto, masing-masing sebagai Komisaris. Pengangkatan dan pengangkatan kembali tersebut efektif sejak penutupan RUPST 2020 sampai dengan penutupan RUPST 2024. Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali Raden Sukhyar sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan satu tahun, efektif sejak penutupan RUPST 2020 sampai dengan penutupan RUPST 2021.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri") No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPST 2020 sebagaimana dibuktikan Surat Perseroan No. 00756/LGD-J/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

Selanjutnya Perseroan mengadakan RUPSLB pada 7 September 2020 yang menyetujui pengangkatan bersyarat Adriansyah Chaniago sebagai Wakil Presiden Direktur, Ogi Prastomiyono sebagai Wakil Presiden Komisaris, Rizal Sukma sebagai Komisaris, Alexandre Silva D'Ambriso sebagai Komisaris dan Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai Komisaris Independen, efektif pada saat terjadinya penyelesaian atas jual beli saham secara langsung melalui Bursa Efek Indonesia antara VCL dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ("SMM") selaku pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, dengan calon pembeli, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), sehubungan dengan kewajiban divestasi 20% saham Perseroan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Amendemen Kontrak Karya tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia ("Transaksi"), sampai dengan penutupan RUPST 2024. Lihat Catatan 38j untuk informasi perubahan struktur pemegang saham di tahun 2020.

Terkait dengan komposisi Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Rudiantara sebagai Ketua Komite Audit yang baru, efektif sejak tanggal 29 Juli 2020.

Sehubungan dengan penyelesaian Transaksi pada tanggal 7 Oktober 2020, pengangkatan bersyarat Adriansyah Chaniago sebagai Wakil Presiden Direktur, Ogi Prastomiyono sebagai Wakil Presiden Komisaris, Rizal Sukma sebagai Komisaris, Alexandre Silva D'Ambriso sebagai Komisaris dan Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai Komisaris Independen menjadi efektif sampai dengan penutupan RUPST 2024.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPSLB 2020 sebagaimana dibuktikan Surat Perseroan No. 00879/CEO-J/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

1. General (continued)

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million ordinary shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

At the EGMS held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's ordinary shares. This became effective on August 3, 2004.

At the EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

The Company held an AGMS on July 29, 2020, which approved among others, the re-appointment of Nicolas D. Kanter as President Director for a one-year period, effective as at the closing of the 2020 AGMS until the closing of the AGMS in 2021.

With regards to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the resignation of Mahendra Siregar as Vice President Commissioner and Independent Commissioner, and the appointment of Rudiantara as Vice President Commissioner and Independent Commissioner. Further, the shareholders approved the re-appointment of Mark James Travers as President Commissioner, and each of Luiz Fernando Landeiro, Cory McPhee, and Nobuhiro Matsumoto, as a Commissioner. The appointments and re-appointments are effective as at the closing of the 2020 AGMS until the closing of the AGMS in 2024. The shareholders also approved the re-appointment of Raden Sukhyar as Independent Commissioner for a one-year period, effective as at the closing of the 2020 AGMS until the closing of the AGMS in 2021.

The Company has complied with the Minister of Energy and Mineral Resources (the "Minister") Regulation No. 7 Year 2020 on the Procedures for Granting of Areas, Licensing and Reporting in Mineral and Coal Mining Business Activities with respect to the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners approved by the shareholders at the 2020 AGMS, as evidenced by the Company's Letter No. 00756/LGD-J/IX/2020 dated September 10, 2020 on the Notification of Changes to the Board of Directors and the Board of Commissioners Composition of PT Vale Indonesia Tbk.

Further, the Company held an EGMS on September 7, 2020, which approved the conditional appointment of Adriansyah Chaniago as Vice President Director, Ogi Prastomiyono as Vice President Commissioner, Rizal Sukma as Commissioner, Alexandre Silva D'Ambriso as Commissioner and Dwia Aries Tina Pulubuhu as Independent Commissioner, effective as at the closing of the direct share sale and purchase through the Indonesian Stock Exchange between VCL and Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ("SMM") as majority and controlling shareholders of the Company, with the potential buyer, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), with respect to the divestment obligation of 20% of the shares in the Company under the Contract of Work Amendment dated October 17, 2014 signed by the Company and the Government of the Republic of Indonesia ("Transaction") until the closing of the AGMS in 2024. Refer to Note 38j for the information regarding changes in shareholders structure in 2020.

With regards to composition of the Audit Committee, the Board of Commissioners of the Company has appointed Rudiantara as the new Chair of the Audit Committee, effective from July 29, 2020.

Following the closing of the Transaction on October 7, 2020, the conditional appointment of Adriansyah Chaniago as Vice President Director, Ogi Prastomiyono as Vice President Commissioner, Rizal Sukma as Commissioner, Alexandre Silva D'Ambriso as Commissioner and Dwia Aries Tina Pulubuhu as Independent Commissioner becomes effective until the closing of the AGMS in 2024.

The Company has complied with the Minister Regulation No. 7 Year 2020 on the Procedures for Granting of Areas, Licensing and Reporting in Mineral and Coal Mining Business Activities with respect to the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners approved by the shareholders at the 2020 EGMS, as evidenced by the Company's Letter No. 00879/CEO-J/X/2020 dated October 15, 2020 on the Notification of Changes to the Board of Directors and the Board of Commissioners Composition of PT Vale Indonesia Tbk.

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

Per 31 Desember 2020 dan 2019, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2020 and 2019, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
Presiden Komisaris	Mark James Travers	Mark James Travers	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Ogi Prastomiyono	-	Vice President Commissioner
Komisaris	Rizal Sukma Luiz Fernando Landeiro Cory McPhee Alexandre Silva D'Ambrosio Nobuhiro Matsumoto Rudiantara* Raden Sukhyar * Dwia Aries Tina Pulubuhu*	Luiz Fernando Landeiro Cory McPhee Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *	Commissioners
Ketua Komite Audit	Rudiantara	-**	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Herwan Ng Felia Salim**	Herwan Ng**	Audit Committee Members
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Adriansyah Chaniago	Febriany Eddy	Vice President Director
Direktur	Febriany Eddy Bernardus Irmanto Dani Widjaja Agus Superiadi Vinicius Mendes Ferreira	Bernardus Irmanto Dani Widjaja Agus Superiadi Vinicius Mendes Ferreira	Directors

* Komisaris Independen

* Independent Commissioners

** Anggota Komite Audit tambahan ditunjuk setelah akhir tahun 2019. Dewan Komisaris Perseroan menyetujui pengangkatan Felia Salim sebagai anggota Komite Audit yang baru efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan Rudiantara sebagai Ketua Komite Audit untuk periode 2020 - 2024.

** Additional Audit Committee members were appointed subsequent to the 2019 year-end. The Board of Commissioners of the Company approved the appointment of Felia Salim as the new member of the Audit Committee effective from January 1, 2020 until December 31, 2021, and Rudiantara as Chairman of the Audit Committee for the period 2020 - 2024.

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan dan entitas anaknya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, entitas anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group". As at December 31, 2020 and 2019, subsidiaries directly owned by the Company were as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Total aset (sebelum dieliminasi)/ Total assets (before elimination)	
		2020	2019	2020	2019
				AS\$/US\$'000	AS\$/US\$'000
PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia	Indonesia	99.9%	99.9%	723	720
PT Kolaka Nickel Indonesia	Indonesia	99.9%	99.9%	9,291	720

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Kolaka Nickel Indonesia ("entitas anak"), yang masing-masing 99,9% sahamnya dimiliki Perseroan dan 0.1% saham dimiliki oleh VCL. Total modal ditempatkan dan disetor pada masing-masing entitas anak adalah sebesar IDR10 miliar (nilai penuh). Perseroan telah membayarkan porsi modal Perseroan di kedua entitas anak tersebut pada bulan Desember 2019. VCL telah membayarkan porsi modal pada kedua entitas anak tersebut pada bulan Mei 2020. Pembentukan entitas anak tersebut merupakan bagian dari tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berdasarkan Amandemen KK, dimana Perseroan berkomitmen atas pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel.

On June 25, 2019, the Company has established two subsidiaries, namely PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia and PT Kolaka Nickel Indonesia ("subsidiaries"), each of which has 99.9% of its shares owned by the Company and 0.1% by VCL. The total capital issued and paid for each subsidiary is IDR10 billion (full amount). The Company has paid up its capital in these subsidiaries in December 2019. VCL has paid up its capital in these subsidiaries in May 2020. The establishment of the subsidiaries is intended as a milestone in the implementation of the Company's investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi provinces based on the CoW Amendment, under which the Company is committed to the construction of nickel ore processing facilities.

Pada bulan April 2020, Perseroan melakukan penyetoran modal tambahan sebesar IDR119,9 miliar atau setara dengan AS\$7,6 juta (nilai penuh) (dengan nilai tukar pada tanggal transaksi) kepada PT Kolaka Nickel Indonesia. Untuk mempertahankan kepemilikan 0,1%, VCL menyetorkan modal tambahan sejumlah IDR120 juta atau setara dengan AS\$7,3 ribu (nilai penuh).

In April 2020, the Company injected an additional capital of IDR119.9 billion or equivalent to US\$7.6 million (full amount) (at the exchange rate at the date of the transaction) to PT Kolaka Nickel Indonesia. To maintain the 0.1% ownership, VCL injected an additional capital of IDR120 million or equivalent to US\$7.3 thousand (full amount).

Jumlah seluruh karyawan Grup pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 3.006 (31 Desember 2019: 3.044) (tidak diaudit).

The total number of employees of the Group as at December 31, 2020 was 3,006 (December 31, 2019: 3,044) (unaudited).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Grup yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan konsolidasian terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk tahun-tahun yang tercakup oleh laporan keuangan ini konsolidasian, kecuali yang dinyatakan dalam Catatan 3. Laporan keuangan konsolidasian Grup diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 25 Februari 2021.

2.1. Penyajian laporan keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh KK dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

2.2. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2.3. Dasar pengukuran

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

2.4. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan dalam Catatan 4.

2.5. Prinsip-prinsip konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas terstruktur), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban antar entitas Grup dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar entitas Grup yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

2.6. Mata uang fungsional, penyajian dan penjabaran mata uang

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas Grup beroperasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir tahun. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

2. Summary of significant accounting policies

The following summary of the significant accounting policies of the Group is presented to assist the reader in evaluating the accompanying consolidated financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the years covered in the consolidated financial statements, except as stated in Note 3. The Group's consolidated financial statements were authorised by the Board of Directors on February 25, 2021.

2.1. Presentation of financial statements

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

2.2. Statement of compliance

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure Guidance issued by the Financial Service Authority ("FSA").

2.3. Basis of measurement

The consolidated financial statements are prepared based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

2.4. Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The Indonesian Financial Accounting Standards also require management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

2.5. Principles of consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings if required under other Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS").

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

2.6. Functional and presentation currency and currency translation

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Group entities operate.

At each reporting date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at year-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognised at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.6. Mata uang fungsional, penyajian dan penjabaran mata uang (lanjutan)

Selama tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laba rugi.

2.7. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, deposito berjangka dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari saat ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

2.8. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak perdiskontoan signifikan, dan dapat mengalami penurunan nilai.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman kepada pihak berelasi Grup.

2.9. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan metode rata-rata tertimbang dari biaya perolehan. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya pengupasan tanah, menambang, bahan baku, bahan bakar, bahan pembantu, tenaga kerja, penyusutan serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

2.10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

Uang muka adalah pembayaran di muka yang dilakukan Grup kepada pemasok. Uang muka dibebankan secara proporsional pada laba rugi sesuai dengan kemajuan dari pembelian barang dan jasa dan kesepakatan dengan pemasok.

2.11. Aset tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk ke dalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.6. Functional and presentation currency and currency translation (continued)

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in profit or loss.

2.7. Cash and cash equivalents and restricted cash

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, time deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

2.8. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel *matte* sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method if the impact of discounting is significant, and are subject to impairment.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting advances to related parties of the Group.

2.9. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined using a weighted average cost method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realisable value.

Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

Cost of finished goods and work in progress comprises stripping, mining, raw materials, fuels, supplies, labor, depreciation and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads.

2.10. Prepayments and advances

Prepaid expenses are charged to profit or loss on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Advances are payments made in advance by the Group to its vendors. Advances are charged to profit or loss based on progress of goods and services purchase and agreements with suppliers.

2.11. Fixed assets

Fixed assets are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.11. Aset tetap (lanjutan)

Biaya pengupasan pasca produksi dimasukkan dalam biaya persediaan, kecuali ketika sebuah proyek baru dikembangkan untuk mendapatkan akses ke cadangan bijih nikel yang signifikan. Dalam hal tersebut, biaya dikapitalisasi dan diamortisasi selama ekstraksi bijih nikel, selama masa manfaat cadangan nikel. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada biaya pengupasan yang dikapitalisasi oleh Grup.

Biaya-biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir ke dalam Grup dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan ke dalam laba rugi pada tahun keuangan dimana hal tersebut terjadi.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

2.12. Aset tetap dalam penyelesaian

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke dalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai.

Untuk pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, di luar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

2.13. Penyusutan dan amortisasi

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya KK (d disesuaikan dengan asumsi perpanjangan) yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan PLTA yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	4 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

Grup memperkirakan nilai sisa aset tetap diatas adalah nihil.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun pelaporan.

Grup mengalokasikan komponen dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.11. Fixed assets (continued)

Post-production stripping costs are included in the cost of inventory, except when a new project is developed to permit access to a significant nickel ore reserve. In such cases, the cost is capitalised and amortised during the extraction of the nickel ore, over the useful life of the ore reserve. As at December 31, 2020 and 2019, there were no stripping costs capitalised by the Group.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of a replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in profit or loss.

Exploration costs are expensed as incurred.

2.12. Construction in progress

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans used in financing construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete.

For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

2.13. Depreciation and amortisation

Depreciation of fixed assets is calculated on a straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW (adjusted for assumed extensions). An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these consolidated financial statements.

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	4 - 30
Furniture and office equipment	5

The Group has estimated the residual value of the above fixed assets at nil.

The assets' residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting year.

The Group allocates significant components of the fixed asset costs and depreciates separately each significant component if those components have different useful lives.

Amortisation of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using the straight-line method.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.14. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas (jika ada) - sebagai contoh, *goodwill* atau aset tak berwujud - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

2.15. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

Pengeluaran - pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Cadangan jaminan reklamasi, yang kemudian diubah dengan suatu mekanisme bank garansi, juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 38b). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pendaur-ulangan atau penghapusan dengan cara lainnya.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto bebas risiko. Di samping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Grup akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Grup mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.14. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life (if any) - for example, goodwill or intangible assets - are not subject to amortisation and are tested annually for impairment. Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss.

2.15. Environmental expenditures

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to profit or loss as incurred or capitalised and depreciated depending on their future economic benefits. A reclamation guarantee reserve which subsequently was changed to a bank guarantee mechanism has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 38b). In addition, a provision for asset retirement has been recognised for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

Provisions for asset retirement are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a risk-free rate. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognised as finance costs.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current year. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for the impairment loss incurred, if any.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Group accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Group applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.16. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk. Penjualan diakui sebagai pendapatan ketika pengendalian atas produk ditransfer ke pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup untuk ditukar dengan produk tersebut. Berdasarkan kontrak penjualan, pendapatan diakui ketika produk dimuat ke kapal pelanggan di pelabuhan muat.

Pendapatan diakui berdasarkan harga yang ditentukan dalam kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan ketentuan pembayaran kontrak, periode antara transfer produk ke pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan kurang dari satu tahun. Ketentuan pembayaran tidak memiliki komponen pembiayaan yang signifikan dan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Beban (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya eksplorasi dan pengupasan tanah) diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

2.17. Pajak penghasilan

Manfaat/(beban) pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan badan kini dan tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam penghasilan atau kerugian komprehensif lain.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak, dan mencakup penyesuaian tahun sebelumnya baik untuk keperluan rekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan, atau untuk mencatat perbedaan yang timbul dari penilaian pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak tangguhan tidak diakui jika timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi sejauh manfaat pajak terkait tidak lagi memungkinkan untuk terealisasi; pengurangan tersebut dilakukan pembalikan ketika kemungkinan laba kena pajak di masa depan meningkat. Dalam menentukan besarnya jumlah pajak kini dan tangguhan, Grup memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan setiap tambahan pajak dan denda.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.16. Revenue and expense recognition

Sales represent revenue earned from the sale of products. Sales are recognised as revenue when the control of the product transfers to customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those products. Based on the sales contracts, revenue is recognised when the product is loaded on to the customer vessel at the loading port.

Revenue is recognised based on the price specified in the contracts with the customer. Based on the contract payment terms, the period between the transfer of the products to the customer and payment by the customer is less than one year. The payment terms do not have a significant financing component and were not changed from previous years.

Expenses (including but not limited to exploration and stripping costs) are recognised as incurred on an accrual basis.

2.17. Income taxes

Income tax benefit/(expense) is comprised of current and deferred corporate income tax. Current tax and deferred tax are recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income or loss.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the end of the reporting period in the countries where the company and its subsidiaries operate and generate taxable income, and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves. In determining the amount of current and deferred tax, the Group considers the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Management periodically evaluates the position taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Liabilitas imbalan kerja

2.18. Employment benefit liabilities

a. Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan

a. Pension and Labor Law benefits

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang berlaku semenjak akhir 2012. Sebelumnya Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharuskan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diakui seolah-olah sebagai program manfaat pasti.

The Company has maintained a defined contribution pension plan starting from the end of 2012. Prior to this, the Company maintained a defined benefit plan. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount. For financial reporting purposes, the defined contribution plan is therefore effectively treated as if it were a defined benefit plan.

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, bersama dengan pengembalian investasi yang dihasilkan dari iuran, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, akun liabilitas imbalan pascakerja.

The Company recognises the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, together with investment returns arising from the contributions, as a liability in the consolidated statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setidaknya setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (karena tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognised in the statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated at least annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laba rugi.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefits expense in profit or loss.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada posisi keuangan konsolidasian.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise. They are included in retained earnings in the consolidated statements of changes in equity and financial position.

Saat manfaat suatu program diganti atau saat suatu program mengalami kurtailmen, dampak perubahannya yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian kurtailmen diakui langsung di laba rugi.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss.

b. Imbalan kesehatan pascakerja

b. Post-retirement medical benefits

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun dan memiliki hak atas fasilitas ini. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang ditandatangani pada bulan Januari 2011 dan memilih untuk mengikuti program ini. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setidaknya setiap tahun oleh aktuaris yang berkualifikasi. Pada tahun 2014, Perseroan mengubah metode pembiayaan atas program ini dengan menggunakan program asuransi.

The Company provides post-retirement medical benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011 and opted to enroll into this program. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified actuary values this liability at least annually. In 2014, the Company changed its method to fund this program through an insurance program.

Pada tahun 2016, Perseroan berhenti menggunakan program asuransi karena peningkatan jumlah premi. Perseroan kemudian menerapkan sebuah pendekatan Layanan Administrasi Saja (pendekatan "ASO") dengan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu administrasi program ini. Pada pendekatan ini, Perseroan menempatkan sejumlah uang untuk dikelola oleh pihak ketiga untuk menutupi biaya medis bagi peserta program. Pihak ketiga menerapkan pendekatan Koordinasi Imbalan ("COB") yang memungkinkan klaim medis dipertimbangkan dalam perhitungan biaya keseluruhan.

In 2016, the Company stopped using an insurance program due to escalating premiums. The Company subsequently implemented an Administrative Service Only approach ("ASO" approach) by engaging a third party appointed by the Company to help administer the program. In this approach, the Company places a certain amount of money to be administered by a third party to cover the medical costs for the program participants. The third party applies the Coordination of Benefit ("COB") approach which allows the medical claim to be considered in the overall cost calculation.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.18. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

c. Imbalan pesangon

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Perseroan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

d. Program bonus

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan.

e. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan program imbalan setara saham dan kinerja unit saham ("PSU") kepada karyawan tertentu ("peserta"). Untuk imbalan setara saham, peserta dapat membeli saham Vale S.A. tanpa ada manfaat yang diberikan oleh karyawan tertentu. Jika saham yang dibeli ditahan selama periode tiga tahun dan peserta masih merupakan karyawan Perseroan, maka peserta berhak mendapatkan dari Perseroan imbalan saham setara dengan jumlah saham yang dibeli oleh peserta.

Untuk program PSU, selama periode empat tahun *vesting cycle* peserta berhak menerima imbalan setara dengan nilai pasar saham biasa Vale S.A. berdasarkan faktor kinerja yang diukur sebagai indikator tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Imbalan ini dibayarkan secara kas dan dapat berupa pembayaran cicilan, tergantung faktor kinerja setiap tahunnya.

2.19. Sewa

Pada tanggal dimulainya kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substantial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan;
- Grup memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset.

Pada tanggal dimulainya kontrak atau pada saat penilaian kembali kontrak yang mengandung sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap unsur sewa berdasarkan harga relatif dari unsur sewa.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal awal sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya, yang terdiri dari nilai awal dari liabilitas sewa yang disesuaikan dengan setiap pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulai, ditambah dengan biaya langsung yang terjadi dan perkiraan biaya untuk membongkar dan melepas aset terkait atau untuk merestorasi area dimana aset tersebut ditempatkan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Kewajiban sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tidak dibayar pada awal kontrak, didiskontokan menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimulainya hingga akhir masa manfaat dari aset hak-guna atau akhir dari masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dinilai untuk penurunan nilai dan disesuaikan atas pengukuran kembali dari liabilitas sewa.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa di masa depan yang timbul dari perubahan suatu indeks atau tingkat, jika ada perubahan dalam estimasi Grup dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan melakukan opsi pembelian, perpanjangan atau pemutusan kontrak. Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara tersebut, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah tercatat dari aset hak-guna, atau diakui dalam laba rugi jika jumlah tercatat dari aset hak-guna telah dikurangi menjadi nol.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Employment benefit liabilities (continued)

c. Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Company recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57 and involves the payment of termination benefits. Termination benefits payable more than 12 months after the reporting date are discounted to reflect present value.

d. Bonus plans

The Company recognises a liability and an expense for bonuses based on the applicable formula which considers various aspects of the Company's performance.

e. Share-based payments

The Company awards eligible employees ("participants") participation in a share matching program and performance share units ("PSU") program. For the share matching program, the participants can acquire Vale S.A.'s shares without any benefits being provided by the eligible employee. If the shares acquired are held for a period of three years and the participants keep an employment relationship with the Company, the participant is entitled to receive from the Company an award in shares, equivalent to the number of shares originally acquired by the participants.

For the PSU program, the participants have the opportunity to receive during a four year-vesting cycle, an award equivalent to the market value of a determined number of common shares and conditioned to Vale S.A.'s performance factor measured as an indicator of total return to the shareholders ("TSR"). This award is paid in cash and can occur in cumulative installments, conditioned to the performance factor of each year.

2.19. Leases

At the inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- The contract involves the use of an identified asset;
- The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease, or if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.19. Sewa (lanjutan)

Grup menyajikan aset hak-guna yang tidak memenuhi definisi properti investasi sebagai aset tetap dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset yang bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa ini sebagai beban menggunakan basis garis lurus selama masa sewa.

2.20. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dari entitas induk dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Grup.

2.21. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional (Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup) untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.22. Instrumen keuangan

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Grup menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Grup atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Grup kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Aset keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Grup menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal dan tidak dapat merubah klasifikasi yang ditentukan saat penerapan awal tersebut.

Seluruh aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali dalam hal aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Biaya transaksi atas aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan dalam laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.19. Leases (continued)

The Group presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property as fixed assets and lease liabilities in the consolidated statements of financial position.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.20. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to shareholders of the parent entity by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of any dilutive potential ordinary shares owned by the Group.

2.21. Segment reporting

An operating segment is a component of an enterprise:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker (the Directors are the Group's chief operating decision maker) to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

2.22. Financial instruments

A financial instrument is recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognised when the Group's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Group's obligations expire or are discharged or cancelled.

Financial assets

Classification and measurement of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. The Group assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI").

Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets at amortised cost.
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL").
- Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification made at initial adoption.

All financial assets are recognised initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.22. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Grup diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, aset keuangan lancar lainnya, piutang non-usaha dari pihak berelasi dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang ditahan hingga pengembalian arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga, dan tidak didesain untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur dengan biaya diamortisasi. Nilai tercatat aset tersebut disesuaikan dengan penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") yang diakui dan diukur. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam 'pendapatan keuangan dan pendapatan lainnya' menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak legal untuk melakukan saling hapus dan terdapat intensi untuk menyelesaikan berdasarkan nilai bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2.23. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui ECL untuk semua aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan pada perkiraan tingkat bunga efektif awal.

ECL diakui dalam tiga tahap ("*general model*") untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal. Untuk eksposur kredit di mana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL ditentukan untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit di mana terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diharapkan selama sisa waktu eksposur risiko kredit, terlepas dari waktu peristiwa gagal bayar (ECL sepanjang umur). Untuk aset keuangan yang terdapat bukti obyektif penurunan nilai, ECL sepanjang umur dihitung pada nilai tercatat bersih (setelah dikurangi penyisihan kredit).

Ketika menentukan apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika mengestimasi ECL, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang mendukung dan relevan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan informasi penilaian kredit dan termasuk informasi *forward-looking*.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.22. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The Group's financial assets measured at amortised cost include cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related parties and other non-current financial assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current assets.

Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent SPPI, and that are not designated at FVTPL, are measured at amortised cost. The carrying amount of these assets is adjusted by any expected credit losses ("ECLs") allowance recognised and measured. Interest income from these financial assets is included in 'finance income and other income' using the effective interest rate method.

Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost. As at December 31, 2020 and 2019, the Group only has financial liabilities measured at amortised cost.

Amortised cost is measured by discounting the liability amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest rate method are recognised in profit or loss.

Trade payables, accruals, other current financial liabilities and borrowings are initially measured at fair value less any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realised and the liability is settled simultaneously.

2.23. Impairment of financial assets

The Group recognises an allowance for ECLs for all the Group's financial assets measured at amortised cost. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate.

ECLs are recognised in three stages ("*general model*") for impairment based on changes in credit quality since initial recognition. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 months (12-months ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (lifetime ECL). For financial assets that have objective evidence of impairment, lifetime ECL is calculated at the net carrying amount (net of credit allowance).

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group compares the risk of a default occurring on the financial assets as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial assets as at the date of initial recognition and considers supportable and reasonable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.23. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup mempertimbangkan bahwa piutang usaha memiliki risiko kredit rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi peringkat investasi yang dipahami secara global. Grup menganggap ini sebagai BBB- oleh S&P atau BBB lebih tinggi oleh Japan Credit Rating Agency. Ketika peringkat kredit di bawah BBB- oleh S&P atau BBB oleh Japan Credit Rating Agency, Grup menilai apakah peningkatan risiko kredit yang signifikan telah terjadi.

2.24. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tahun dimana dividen tersebut diumumkan.

2.25. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika individu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau *joint venture* yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan di atas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

3. Perubahan kebijakan akuntansi

PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun-tahun finansial pada atau setelah 1 Januari 2020 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) - Penyajian Laporan Keuangan
- Amandemen PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 15 - Inventasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK 25 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- Amendemen PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang reformasi acuan suku bunga
- PSAK 62 - Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- Amendemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan, tentang reformasi acuan suku bunga
- Amendemen PSAK 73 - Sewa, tentang konsesi sewa terkait Covid-19
- PSAK 101 - Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- PSAK 102 - Akuntansi Murabahah

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.23. Impairment of financial assets (continued)

The Group considers trade receivables to have low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of 'investment grade'. The Group considers this to be BBB- per S&P or BBB or higher per the Japan Credit Rating Agency. When the credit rating is below the BBB- per S&P or BBB per Japan Credit Rating Agency, the Group assesses whether a significant increase in credit risk has occurred.

2.24. Dividends

Dividend distributions to the shareholders are recognised as a liability in the Group's consolidated statements of financial position in the year in which the dividends are declared.

2.25. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 32 to the Consolidated Financial Statements.

3. Changes in accounting policies

The following new/revised SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued and effective for financial years starting on or after January 1, 2020 did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year or prior year:

- SFAS 1 (2019 Annual Improvement) - Presentation of Financial Statements
- Amendments to SFAS 1 - Presentation of Financial Statements: Title of Financial Statements
- Amendments to SFAS 15 - Investments in Associates and Joint Ventures
- Amendments to SFAS 25 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
- Amendments to SFAS 60 - Financial Instruments: Disclosure, about interest rate benchmark reform
- SFAS 62 - Insurance Contracts
- Amendments to SFAS 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation
- Amendments to SFAS 71 - Financial Instruments, about interest rate benchmark reform
- Amendments to SFAS 73 - Leases, about rent concession related to Covid-19
- SFAS 101 - Presentation of Financial Statements of Endowment Entities
- SFAS 102 - Murabahah Accounting

3. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- ISAK 35 - Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- ISAK 36 - Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa
- ISAK 101 - Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan
- ISAK 102 - Penurunan Nilai Piutang Murabahah
- Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") 13 - Penarikan dari PSAK 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Grup telah menerapkan secara dini standar-standar baru berikut yang diwajibkan dari tanggal 1 Januari 2020 sejak 1 Januari 2019:

- PSAK 71 - Instrumen Keuangan
- PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 - Sewa

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek atau Panjang
- Amandemen PSAK 22 - Kombinasi Bisnis
- Amandemen PSAK 55 - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- Amandemen PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- Amandemen PSAK 62 - Kontrak Asuransi, tentang reformasi acuan suku bunga (tahap 2)
- Amandemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan, tentang reformasi acuan suku bunga (tahap 2)
- Amandemen PSAK 73 - Sewa, tentang reformasi acuan suku bunga (tahap 2)
- PSAK 74 - Kontrak Asuransi
- PSAK 110 - Akuntansi Sukuk
- PSAK 111 - Akuntansi Wa'd
- PSAK 112 - Akuntansi Wakaf

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus-menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan atas peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan dalam tahun mendatang. Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan konsolidasian.

4.1. Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Grup. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas, biaya modal dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas puma operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

3. Changes in accounting policies (continued)

- ISAK 35 - Presentation of Financial Statements for Non-profit Oriented Entities
- ISAK 36 - Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in SFAS 16: Fixed Assets and SFAS 73: Leases
- ISAK 101 - Recognition of Murabahah Deferred Income without Significant Risk Related to Inventory Ownership
- ISAK 102 - Impairment of Murabahah Receivables
- Statement of Withdrawal of Financial Accounting Standard 13 - Withdrawal of SFAS 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities

The Group had early adopted the following new standards which are mandatory from January 1, 2020 since January 1, 2019:

- SFAS 71 - Financial Instruments
- SFAS 72 - Revenue from Contracts with Customers
- SFAS 73 - Leases

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for financial years beginning January 1, 2020 are as follows:

- Amendments to SFAS 1 - Presentation of Financial Statements: Liabilities Classification as Short or Long Term
- Amendments to SFAS 22 - Business Combinations
- Amendments to SFAS 55 - Financial instruments: Recognition and Measurement
- Amendments to SFAS 60 - Disclosures
- Amendments to SFAS 62 - Insurance Contracts, about interest rate benchmark reform (batch 2)
- Amendments to SFAS 71 - Financial Instruments, about interest rate benchmark reform (batch 2)
- Amendments to SFAS 73 - Lease, about interest rate benchmark reform (batch 2)
- SFAS 74 - Insurance Contracts
- SFAS 110 - Sukuk Accounting
- SFAS 111 - Wa'd Accounting
- SFAS 112 - Accounting for Endowments

4. Critical accounting estimates and judgments

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the consolidated financial position reported in future years. Further details of the nature of these assumptions and conditions can be found in the relevant notes to the consolidated financial statements.

4.1. Reserves estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Group's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical, capital costs and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's consolidated financial results and financial position in a number of ways, including:

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortisation charged in profit or loss may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Kebijakan akuntansi Grup atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan (termasuk penelaahan masa periode KK); besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang; dan juga tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dari jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang telah diakui ditinjau secara berkala dan diperbaharui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

Pada tahun 2018, Perseroan mengubah estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2036 dan 2051 menjadi antara tahun 2041 dan 2056. Pada tahun 2019, Perseroan merubah rencana penambangan dan produksi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan perubahan estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2041 dan 2056 menjadi antara tahun 2045 dan 2060. Hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa probabilitas untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melanjutkan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun (lihat Catatan 1) meningkat. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan proses divestasi Perseroan (lihat Catatan 38d). Walaupun demikian, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi Perseroan.

4.3. Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan Grup. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap tahun pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat dipulihkan kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

4.2. Provision for asset retirement

The Group's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework (including assessment of the period of the CoW); the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities; and also the discount rate. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The recognised provision is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

In 2018, the Company changed the estimated period of its mine closure from between 2036 and 2051 to between 2041 and 2056. In 2019, the Company changed its mining and production plan at South and Central Sulawesi areas which resulted in a change in the estimated period of mine closure from between 2041 and 2056 to between 2045 and 2060. This is because the Company believes that the probability of obtaining the Government's approval to continue its operations for two additional ten-year periods (see Note 1) is increasing. This is especially associated with the development of the Company's divestment process (see Note 38d). Nevertheless, actual results may differ from the Company's estimates.

4.3. Income taxes

Judgment and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Group. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the year in which the determination was made.

All judgements and estimates made by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group can take several years to complete and, in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

4.4. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, an asset or a cash generating unit is evaluated at every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs of disposal and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserves estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat bunga diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat kenaikan klaim kesehatan di masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Grup menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah (karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

5. Kas dan setara kas

31 Desember	2020	2019	December 31
--------------------	-------------	------	-------------

(Dalam ribuan Dolar AS)

(US Dollars, in thousands)

Kas di bank:

Dalam mata uang Dolar AS		
PT Bank UOB Indonesia	92,085	31,397
Citibank N.A.	88,650	48,700
Standard Chartered Bank	80,399	-
JP Morgan Chase Bank N.A.	34,026	38,285
Dalam mata uang Rupiah		
Citibank N.A.	19,000	17,398
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	3,537	1,930
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	262	1,325
	317,959	139,035

Cash in bank:

Denominated in US Dollars	
PT Bank UOB Indonesia	31,397
Citibank N.A.	48,700
Standard Chartered Bank	-
JP Morgan Chase Bank N.A.	38,285
Denominated in Rupiah	
Citibank N.A.	17,398
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1,930
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,325

Deposito berjangka:

Dalam mata uang Dolar AS		
Banco Bradesco	70,723	55,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	45,000
ANZ Bank	-	10,000
	70,723	110,000

Time deposits:

Denominated in US Dollars	
Banco Bradesco	55,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	45,000
ANZ Bank	10,000

Jumlah	388,682	249,035	Total
---------------	----------------	---------	--------------

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
Deposito Dolar AS	0.9%	2.6%	US Dollar deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

6. Kas yang dibatasi penggunaannya

6. Restricted cash

31 Desember	2020	2019	December 31
--------------------	-------------	------	-------------

(Dalam ribuan Dolar AS)

(US Dollars, in thousands)

Deposito berjangka:

Dalam mata uang Dolar AS		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	30,612	15,412
	30,612	15,412

Time deposits:

Denominated in US Dollars	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	15,412

Dikurangi:

Less:

Bagian tidak lancar:		
Dalam mata uang Dolar AS		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	(30,612)	(15,412)

Non-current portion:	
Denominated in US Dollars	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	(15,412)

Bagian lancar	-	-	Current portion
---------------	---	---	-----------------

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi dan penutupan tambang (lihat Catatan 38b).

The time deposits placed with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk are intended as collateral in relation to the bank guarantees issued by the bank in relation to the reclamation and mine closure guarantees (refer to Note 38b).

6. Kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Perubahan kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan pembayaran pinjaman bank yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	-	15,607	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	-	3,902	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	-	(19,509)	Withdrawal of restricted cash
Total perubahan dari arus kas pendanaan	-	(15,607)	Total changes from financing cash flows
Saldo akhir	-	-	Ending balance

6. Restricted cash (continued)

The movement in restricted cash intended for payments of bank loans arising from financing activities is as follows:

7. Piutang usaha

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak-pihak berelasi dalam mata uang Dolar AS	60,040	107,295	Related parties denominated in US Dollars

7. Trade receivables

Dikarenakan piutang usaha bersifat jangka pendek, nilai piutang yang tercatat mendekati nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of trade receivables, the carrying amount approximates the fair value.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada piutang usaha yang dijaminkan, dan piutang usaha sebesar AS\$60,0 juta (2019: AS\$107,3 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2020 and 2019, there were no trade receivables pledged as collateral, and trade receivables of US\$60.0 million (2019: US\$107.3 million) (full amount) were not yet past due nor impaired.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the year, management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2020 and 2019.

Lihat Catatan 32 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 32 for details of related party balances and transactions.

8. Aset keuangan lainnya

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada karyawan	6,020	6,289	Loans to employees
Tagihan kepada kontraktor	813	1,088	Receivables from contractors
Jumlah	6,833	7,377	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
- Pinjaman kepada karyawan	(4,321)	(4,623)	- Loans to employees
Bagian lancar	2,512	2,754	Current portion

8. Other financial assets

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh aset keuangan lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2020 and 2019, all other financial assets were not yet past due nor impaired.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan pinjaman kepada masing-masing karyawan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on a review of the status of each loan to employees at the end of the year, management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2020 and 2019.

Lihat Catatan 32 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 32 for details of related party balances and transactions.

9. Persediaan

9. Inventories

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Nikel			Nickel
Dalam proses	49,493	55,452	In process
Barang jadi	19,412	13,212	Finished
	68,905	68,664	
Bahan pembantu	77,590	80,151	Supplies
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(2,008)	(854)	Less: Provision for obsolete supplies
	75,582	79,297	
Jumlah	144,487	147,961	Total

Mutasi penyisihan untuk bahan pembantu usang:

Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	(854)	-	Beginning balance
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(3,491)	(854)	Provision for obsolete supplies
Penghapusan	2,337	-	Write-off
Saldo akhir	(2,008)	(854)	Ending balance

Manajemen yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang pada tanggal 31 Desember 2020.

Management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies as at December 31, 2020.

Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2020 (31 Desember 2019: nihil).

There were no inventories pledged as collateral as at December 31, 2020 (December 31, 2019: nil).

Biaya persediaan yang dijual atau digunakan dalam operasi diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" (lihat Catatan 23).

The cost of inventories sold or used in operations is recognised as an expense and included in "cost of revenue" (refer to Note 23).

Pada tanggal 31 Desember 2020, semua persediaan telah diasuransikan bersama-sama dengan aset tetap Grup (lihat Catatan 11). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

As at December 31, 2020, all inventories were insured together with the Group's fixed assets (refer to Note 11). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in matte finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses.

10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

10. Prepayments and advances

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Asuransi dibayar di muka	2,139	1,977	Prepaid insurance
Uang muka ke pemasok	1,646	1,019	Advance to vendors
Lainnya	142	112	Others
Jumlah	3,927	3,108	Total

11. Aset tetap

11. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2020	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan						Cost
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	934,716	-	1,493	(55)	936,154	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	73,445	-	10,836	-	84,281	Roads and bridges
Bangunan	716,767	-	26,820	(979)	742,608	Buildings
Pabrik dan mesin	1,754,375	-	95,432	(38,262)	1,811,545	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	22,061	-	1,806	-	23,867	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	74,105	11,436	11,813	-	97,354	Mine development
Sewa	2,303	458	-	-	2,761	Leases
Aset tetap dalam penyelesaian *)	149,798	160,635	(148,200)	(10,022)	152,211	Construction in progress *)
Jumlah	3,727,570	172,529	-	(49,318)	3,850,781	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(414,015)	(21,678)	-	-	(435,693)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(42,408)	(4,922)	-	-	(47,330)	Roads and bridges
Bangunan	(510,928)	(25,028)	-	415	(535,541)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,240,225)	(87,440)	-	37,108	(1,290,557)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(20,747)	(632)	-	-	(21,379)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(30,567)	(7,922)	-	-	(38,489)	Mine development
Sewa	(1,218)	(1,428)	-	-	(2,646)	Leases
Jumlah	(2,260,108)	(149,050)	-	37,523	(2,371,635)	Total
Nilai buku bersih	1,467,462				1,479,146	Net book value

*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.

	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan						Cost
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	932,526	-	2,953	(763)	934,716	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	70,596	-	3,923	(1,074)	73,445	Roads and bridges
Bangunan	647,454	-	76,298	(6,985)	716,767	Buildings
Pabrik dan mesin	1,714,912	-	74,804	(35,341)	1,754,375	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	22,153	-	790	(882)	22,061	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	51,979	2,606	20,456	(936)	74,105	Mine development
Sewa	-	2,303	-	-	2,303	Leases
Aset tetap dalam penyelesaian *)	162,655	166,367	(179,224)	-	149,798	Construction in progress *)
Jumlah	3,602,275	171,276	-	(45,981)	3,727,570	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(392,365)	(21,650)	-	-	(414,015)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(39,134)	(4,321)	-	1,047	(42,408)	Roads and bridges
Bangunan	(495,930)	(20,631)	-	5,633	(510,928)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,192,878)	(79,429)	-	32,082	(1,240,225)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(21,075)	(549)	-	877	(20,747)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(26,383)	(4,746)	-	562	(30,567)	Mine development
Sewa	-	(1,218)	-	-	(1,218)	Leases
Jumlah	(2,167,765)	(132,544)	-	40,201	(2,260,108)	Total
Nilai buku bersih	1,434,510				1,467,462	Net book value

*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.

11. Aset tetap (lanjutan)

Grup menyewa ruang kantor dari PT Api Metra Graha dan bus dari PT Sinar Jaya Langgeng Utama (Catatan 31). Informasi mengenai sewa di mana Grup adalah penyewa disajikan sebagai berikut:

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Penyusutan/ Depreciation	Pengurangan/ Disposals	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Bangunan	419	-	(304)	-	115	Buildings
Pabrik dan mesin	666	458	(1,124)	-	-	Plant and machinery
Jumlah	1,085	458	(1,428)	-	115	Total

	1 Januari 2019 January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Penyusutan/ Depreciation	Pengurangan/ Disposals	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Bangunan	-	779	(360)	-	419	Buildings
Pabrik dan mesin	-	1,524	(858)	-	666	Plant and machinery
Jumlah	-	2,303	(1,218)	-	1,085	Total

Liabilitas sewa yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Lease liabilities recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
-------------	------	------	-------------

(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Liabilitas sewa	66	1,120	Lease liabilities	
Dikurangi: Bagian jangka panjang	-	(173)	Less: Non-current portion	
Bagian jangka pendek	66	947	Current portion	

Beban bunga yang diakui pada laba rugi dan pembayaran yang dilakukan oleh Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 masing-masing adalah AS\$27 ribu (31 Desember 2019: AS\$63 ribu) dan AS\$1,5 juta (31 Desember 2019: AS\$1,2 juta) (nilai penuh).

Interest expense recognised in profit or loss and payments made by the Group for the year ended December 31, 2020 were US\$27 thousand (December 31, 2019: US\$63 thousand) and US\$1.5 million (December 31, 2019: US\$1.2 million) (full amount), respectively.

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 was allocated as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
-------------	------	------	-------------

(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Beban pokok pendapatan (lihat Catatan 23)	148,747	132,184	Cost of revenue (refer to Note 23)	
Beban usaha	303	360	Operating expenses	
Jumlah	149,050	132,544	Total	

Pada tanggal 31 Desember 2020, semua aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanikal atau elektrikal termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk keseluruhan aset dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2020 adalah AS\$4,5 miliar (31 Desember 2019: AS\$4,3 miliar) (nilai penuh), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2019: AS\$800 juta) (nilai penuh). Seluruh aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2020, all of the fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by all industrial risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the total assets and related business interruption exposure as at December 31, 2020 was US\$4.5 billion (December 31, 2019: US\$4.3 billion) (full amount), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2019: US\$800 million) (full amount). The fixed assets are insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

There were no fixed assets pledged as collateral as at December 31, 2020 and 2019.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$521,6 juta (31 Desember 2019: AS\$542,9 juta) (nilai penuh). Nilai buku bersih aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah nihil.

The gross carrying value of each fixed asset that is fully depreciated and still in use was US\$521.6 million (December 31, 2019: US\$542.9 million) (full amount). Net book value of fixed assets which are permanently inactive and not classified as held for sale as at December 31, 2020 and 2019 was nil.

Grup telah melakukan pengkajian atas masa manfaat dan nilai sisa aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

The Group has performed a review of the useful lives and residual value of the Company's fixed assets as at December 31, 2020 and based on that review, the Company did not identify any changes in the useful lives of the fixed assets.

11. Aset tetap (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat penyesuaian atas kenaikan jumlah kewajiban penghentian pengoperasian aset yang dikapitalisasi dalam aset pengembangan tambang sebesar AS\$11,4 juta (31 Desember 2019: AS\$2,6 juta) (nilai penuh). Nilai tercatat aset tetap yang dilepas dan rugi pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah AS\$11,8 juta (31 Desember 2019: AS\$5,8 juta) (nilai penuh) dan AS\$10,4 juta (31 Desember 2019: AS\$4,9 juta).

12. Aset tetap dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal pelaporan.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

31 Desember	2020	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(US Dollars, in thousands)				
<i>Furnace 4 rebuild</i>	31,197	43%	2021	Furnace 4 rebuild
Persiapan Proyek Bahodopi	9,364	15%	2025	Bahodopi Project Preparation
Pengembangan tambang 2020	8,642	64%	2021	Mine Development 2020
Penggantian Dozer 350 HP Mine	8,016	99%	2021	Replacement Dozer 350 HP Mine
Lainnya di bawah AS\$7 juta	94,992	-	-	Others below US\$7 million
Jumlah	152,211		Total	

31 Desember	2019	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu Penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(US Dollars, in thousands)				
Pengembangan tambang 2019	17,609	79 - 99	2020	Mine development 2019
<i>Mobile screening station</i>	8,834	99	2020	Mobile screening station
Lainnya di bawah AS\$7 juta	123,355	-	-	Others below US\$7 million
Jumlah	149,798		Total	

13. Utang usaha

31 Desember	2020	2019	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pihak-pihak berelasi			Related parties
Dalam mata uang Dolar AS	140	2,071	Denominated in US Dollars
	140	2,071	
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	58,261	63,132	Denominated in Indonesian Rupiah
Dalam mata uang Dolar AS	45,613	26,701	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Euro	4,033	591	Denominated in Euro
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	5,048	4,913	Denominated in other currencies (below US\$1 million)
	112,955	95,337	
Jumlah	113,095	97,408	Total

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah jangka pendek sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan.

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang usahanya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Lihat Catatan 32 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

11. Fixed assets (continued)

For the year ended December 31, 2020 there was an adjustment to increase the amount of the asset retirement obligation capitalised in mine development assets by US\$11.4 million (December 31, 2019: US\$2.6 million) (full amount). The carrying amount of fixed assets disposed and loss on disposal of fixed assets for the year ended December 31, 2020 was US\$11.8 million (December 31, 2019: US\$5.8 million) (full amount) and US\$10.4 million (December 31, 2019: US\$4.9 million), respectively.

12. Construction in progress

Construction in progress represents capital projects that have not been completed at the reporting dates.

The construction in progress is as follows:

31 Desember	2020	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(US Dollars, in thousands)				
<i>Furnace 4 rebuild</i>	31,197	43%	2021	Furnace 4 rebuild
Persiapan Proyek Bahodopi	9,364	15%	2025	Bahodopi Project Preparation
Pengembangan tambang 2020	8,642	64%	2021	Mine Development 2020
Penggantian Dozer 350 HP Mine	8,016	99%	2021	Replacement Dozer 350 HP Mine
Lainnya di bawah AS\$7 juta	94,992	-	-	Others below US\$7 million
Jumlah	152,211		Total	

31 Desember	2019	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu Penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(US Dollars, in thousands)				
Pengembangan tambang 2019	17,609	79 - 99	2020	Mine development 2019
<i>Mobile screening station</i>	8,834	99	2020	Mobile screening station
Lainnya di bawah AS\$7 juta	123,355	-	-	Others below US\$7 million
Jumlah	149,798		Total	

13. Trade payables

31 Desember	2020	2019	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pihak-pihak berelasi			Related parties
Dalam mata uang Dolar AS	140	2,071	Denominated in US Dollars
	140	2,071	
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	58,261	63,132	Denominated in Indonesian Rupiah
Dalam mata uang Dolar AS	45,613	26,701	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Euro	4,033	591	Denominated in Euro
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	5,048	4,913	Denominated in other currencies (below US\$1 million)
	112,955	95,337	
Jumlah	113,095	97,408	Total

The trade payables arose from the purchase of goods and services. The amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement.

There were no guarantees made by the Group for its payables as at December 31, 2020 and 2019.

Refer to Note 32 for details of related party balances and transactions.

14. Perpajakan

14. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pajak penghasilan badan ("PPH Badan")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2020	2,229	-	- CIT 2020
- PPh Badan 2019	34,268	29,146	- CIT 2019
- PPh Badan 2018	-	6,988	- CIT 2018
	36,497	36,134	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak dalam sengketa *)	116,429	119,233	- Taxes in dispute *)
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	70,201	77,616	- Value Added Tax ("VAT")
- Pajak impor	737	743	- Import tax
	187,367	197,592	
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(22,951)	(8,746)	Less: Provision for impairment
Jumlah	200,913	224,980	Total
Dikurangi: Bagian lancar	(96,324)	(78,160)	Less: Current portion
Bagian tidak lancar	104,589	146,820	Non-current portion

*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.

*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.

Mutasi penyisihan untuk penurunan nilai dari ketidakpastian posisi pajak adalah sebagai berikut:

Movement in provision for impairment from uncertain tax positions is as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	(8,746)	-	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	(16,136)	(8,746)	Addition during the year
Penghapusan	1,931	-	Write-off
Saldo akhir	(22,951)	(8,746)	Ending balance

Manajemen yakin bahwa penyisihan penurunan nilai telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari ketidakpastian posisi pajak terkait pajak dalam sengketa yang dibahas lebih lanjut dalam Catatan 14e.

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses from uncertain tax positions related to the taxes in dispute discussed further in Note 14e.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pajak lainnya			Other taxes
- PPh pasal 21	1,096	901	- Withholding Tax ("WHT") article 21
- PPh pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26	423	473	- WHT articles 4(2), 15, 22, 23 and 26
- PPN terhutang	274	400	- VAT payable
Jumlah	1,793	1,774	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Beban pajak penghasilan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The consolidated income tax expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kini	37,043	34,207	Current
Tangguhan	(29,152)	(10,373)	Deferred
Penyesuaian tahun sebelumnya	13,935	7,902	Previous year adjustments
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	21,826	31,736	Total consolidated income tax expenses

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Pemerintah telah mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya, sesuai dengan Pasal 5 bagian 1 dari Perppu No. 1 tahun 2020. Tarif pajak sebelumnya untuk tahun 2019 adalah 25%. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 31 Maret 2020, setelah dikeluarkannya Peraturan sebagai Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Sistem Keuangan sehubungan dengan Wabah Virus Corona 2019 ("COVID-19") dan/atau untuk mengantisipasi ancaman yang akan membahayakan Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Perppu tersebut telah diundangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2020 yang berlaku efektif 18 Mei 2020.

The Government has reduced the Corporate Income Tax rate to 22% for 2020-2021 and 20% for 2022 onwards, according to Article 5 section 1 of Perppu No. 1 of 2020. The previous tax rate for 2019 was 25%. This policy was effective since March 31, 2020, following the issuance of a Regulation in Lieu of Law concerning Financial System Stability Policy and Financial System Policy in connection with the Corona Virus 2019 ("COVID-19") outbreak and/or to anticipate threats that will endanger the National Economy and/or Stability of the State Financial System. This Perppu was ratified to Law No. 2 Year 2020 dated May 18, 2020.

Perhitungan pajak penghasilan kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak yang dapat direvisi pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Basis yang digunakan dalam estimasi ini sama dengan yang digunakan dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

Current income tax calculations for the years ended December 31, 2020 and 2019 are based on estimated taxable income and may be revised when filing annual tax returns. The basis used for the estimates is the same as that used in the preparation of the annual tax return to be filed with the tax authority.

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit/(loss) before income tax as shown in these consolidated financial statements and the estimated consolidated taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	104,645	89,136	Consolidated profit before income tax
Ditambah: Rugi sebelum pajak penghasilan - entitas anak	514	-	Add: Loss before income tax - subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	105,159	89,136	Profit before income tax - the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	47,759	42,917	Difference between commercial and tax depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	2,007	5,291	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2,071	2,324	Provision for asset retirement
Perubahan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan bahan pembantu usang	1,154	854	Change in provision for decline in inventory value and obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	8	(315)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	6,338	(9,581)	Other accruals/provisions
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pendapatan kena pajak final	(360)	(815)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4,242	7,015	Non-deductible expenses
Penghasilan kena pajak - Perseroan	168,378	136,826	Taxable income - the Company
Pajak penghasilan kini pada tarif 22% (2019: 25%) - Perseroan	37,043	34,207	Current income tax at 22% (2019: 25%) - the Company
Pajak penghasilan kini - entitas anak	-	-	Current income tax - subsidiaries
Pajak penghasilan kini - konsolidasian	37,043	34,207	Current income tax - consolidated
Pembayaran pajak di muka - konsolidasian	(39,272)	(63,353)	Prepayment of income taxes - consolidated
Lebih bayar pajak - konsolidasian	(2,229)	(29,146)	Over payment of tax - consolidated

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dengan hasil perhitungan teoritis dari laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of consolidated income tax expense to the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before income tax for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	104,645	89,136	Consolidated profit before income tax
Ditambah: Rugi sebelum pajak penghasilan - entitas anak	514	-	Add: Loss before income tax - subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	105,159	89,136	Profit before income tax - the Company
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 22% (2019: 25%)	23,135	22,284	Income tax calculated at 22% (2019: 25%)
Dampak penyesuaian tarif pajak pada pajak tangguhan	(16,098)	-	Impact of tax rate adjustment on deferred tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	933	1,754	Non-deductible expenses
Pendapatan kena pajak final	(79)	(204)	Income subject to final tax
Penyesuaian tahun sebelumnya	13,935	7,902	Previous year adjustments
Beban pajak penghasilan konsolidasian	21,826	31,736	Consolidated income tax expenses

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Changes in the deferred tax liabilities for the years ended December 31, 2020 and 2019 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2020	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi*/ (Credited)/ Charged to profit or loss*)	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income)	31 Desember/ December 31, 2020	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	103,945	(28,703)	-	75,242	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(4,855)	665	(1,167)	(5,357)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(11,090)	(231)	-	(11,321)	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	(214)	(188)	-	(402)	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(195)	37	-	(158)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(7,101)	(732)	-	(7,833)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	80,490	(29,152)	(1,167)	50,171	Deferred tax liabilities, net

*) Termasuk penyesuaian terhadap kewajiban pajak tangguhan karena perubahan tarif pajak penghasilan badan sejumlah AS\$16,1 juta (nilai penuh).
*) Including adjustments on deferred tax liabilities as a result of changes in income tax rate, amounting to US\$16.1 million (full amount).

	1 Januari/ January 1, 2019	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	119,226	(15,281)	-	103,945	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(3,999)	(1,045)	189	(4,855)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(16,953)	5,863	-	(11,090)	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	-	(214)	-	(214)	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(325)	130	-	(195)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(7,275)	174	-	(7,101)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	90,674	(10,373)	189	80,490	Deferred tax liabilities, net

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Jenis Pajak/ Tax Assessment Letter/ Tax Type	Tahun pajak/ Fiscal year	Nilai awal sengketa pajak/ Original tax in-dispute amount	Diterima oleh Grup atau kalah pada banding terakhir/ Accepted by the Group or lost on final appeal	Restitusi/ Refund	Selisih nilai tukar mata uang asing dan penyesuaian lainnya/ Exchange rate and other adjustments	Saldo akhir dan status terakhir per 31 Desember 2020/ Ending balance and latest status as of December 31, 2020	Catatan/ Notes
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
00003/204/04/09 1/11 PPh Pasal 26/WHT Article 26	2004	9,439	(1,159)	(7,124)	(410)	746	a)
00003/206/04/091/11 PPh Badan/CIT	2004	4,629	(1,112)	-	-	3,517	a)
00006/206/06/09 1/11 PPh Badan/CIT	2006	6,406	(466)	-	-	5,940	a)
00014/406/08/091/10 PPh Badan/CIT	2008	1,931	(1,931)	-	-	-	a)
00006/206/10/091/14 PPh Badan/CIT	2010	19,410	-	(10,910)	-	8,500	a)
00007/406/11/09 1/13 PPh Badan/CIT	2011	4,911	-	(839)	1	2,758 1,315	a) b)
00026/406/12/091/14 PPh Badan/CIT	2012	647	-	-	-	647	a)
00056/207/13/091/17 sampai dengan/ To 00067/207/13/091/17 PPN/VAT	2013	8,871	-	(162)	(179)	8,530	d)
00007/206/14/091/17 PPh Badan/CIT	2014	38,040	-	-	-	38,040	e)
00002/245/14/09 1/17 sampai dengan/ To 00013/245/14/091 PPh Pasal 26/WHT Art. 26	2014	20,789	-	-	191	20,980	e)
00024/406/15/091/17 PPh Badan/CIT	2015	3,820	-	-	-	3,820	c)
00001/203/15/803/17 PPh Pasal 23/WHT Article 23	2015	811	-	(746)	(65)	-	c)
00039/406/16/091/18 PPh Badan/CIT	2016	7,942	-	-	-	7,942	f)
00023/406/17/091/19 PPh Badan/CIT	2017	2,355	-	-	-	2,355	f)
10148/84/DBN.PL/2018 PNBP/ Non-Tax State Revenue	2014-2016	1,036	-	-	-	1,036	g)
00016/406/17/09 1/19 PPh Badan/CIT	2018	2,942	-	-	-	2,942	h)
Surat ketetapan pajak lainnya*/ Other tax assessment letters*		13,500	(528)	(5,387)	(224)	7,361	
Total pajak dalam proses banding/ Total taxes in-dispute		147,479	(5,196)	(25,168)	(686)	116,429	

* Dengan nilai saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 kurang dari AS\$0,5 juta per ketetapan/
* With ending balances as of December 31, 2020 less than US\$0.5 million per assessment.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

- a) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Assistance Agreement* ("MAA") kepada VCL dimana Direktorat Jenderal Pajak menilai sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan dipotong PPh Pasal 26. Khusus untuk tahun pajak 2010, sengketa juga melibatkan pembayaran *Technical Assistance Agreement* ("TAA") kepada VCL. Perseroan tidak setuju dengan ketetapan ini.

Sengketa yang belum terselesaikan dengan jumlah total AS\$22,1 juta (nilai penuh) sedang dilakukan banding melalui jalur *Mutual Agreement Procedure* ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B").

Khusus untuk tahun pajak 2004, Perseroan juga meyakini bahwa surat ketetapan pajak yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2011, telah melewati batas waktu lima tahun sesuai P3B tersebut. Untuk sengketa tahun pajak 2008 senilai AS\$1,9 juta (nilai penuh), Perseroan telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung di 2020 dan atas jumlah yang ditolak tersebut telah dilakukan penghapusan.

- b) Sengketa terkait biaya-biaya sehubungan dengan perjanjian pinjaman sebesar AS\$1,3 juta (nilai penuh) yang dianggap tidak seharusnya dibebankan kepada Perseroan, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perseroan meyakini bahwa biaya-biaya dalam rangka perolehan pinjaman untuk kepentingan usaha utama dalam hal ini perusahaan nikel dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan dan juga KK. Sengketa pajak ini masih dalam tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

- c) Sengketa terkait koreksi atas biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya-biaya Akademi Teknik Sorowako, biaya-biaya Jasa Manajemen dan Teknis, biaya-biaya royalti, biaya-biaya jaminan hutang, biaya konsultan, biaya pengiriman, biaya konsinyasi stok, biaya kontribusi lainnya, dan biaya donasi dengan jumlah koreksi sebesar AS\$4,6 juta (nilai penuh). Perseroan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Untuk sengketa PPh Pasal 23 terkait jasa-jasa yang dianggap belum dipotong PPhnya dengan nilai AS\$811 ribu (nilai penuh) Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan perseroan. Adapun untuk sengketa PPh Badan, Pengadilan Pajak telah mengabulkan sebagian banding Perseroan senilai AS\$2,2 juta (nilai penuh), dan menolak sengketa terkait biaya royalti senilai AS\$1,6 juta (nilai penuh). Perseroan akan menyampaikan permohonan restitusi dan mempertimbangkan untuk Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas sengketa biaya royalti yang masih ditolak.

- d) Sengketa terkait koreksi utamanya atas penyebaran slag pada jalan tambang dan jasa luar negeri dengan jumlah koreksi sebesar AS\$17,6 juta (nilai penuh). Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar IDR2,5 miliar atau setara dengan AS\$0,2 juta (nilai penuh) dimana telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Di 2018, Perseroan telah membayarkan 50% dari sisa saldo tersebut dan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak telah mengeluarkan putusan untuk kasus sengketa terkait jasa luar negeri dan telah menerima seluruhnya permohonan banding Perseroan. Pengadilan pajak telah membacakan putusan untuk kasus sengketa terkait PPN Jasa Luar Negeri dengan mengabulkan permohonan banding Perseroan, namun menolak permohonan banding Perseroan untuk sengketa PPN Pemungutan. Kedua dokumen putusan banding tersebut baru diterima Perseroan di bulan Januari 2021 dan akan ditindaklanjuti untuk proses restitusi senilai AS\$2,2 juta (nilai penuh). Adapun untuk nilai sengketa yang ditolak Perseroan akan membayar AS\$31,6 ribu (nilai penuh) ditambah 100% sanksi administrasi senilai AS\$31,6 ribu (nilai penuh). Terkait PPN 2013 lainnya khususnya atas pemanfaatan slag untuk jalan tambang, masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Pajak.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

- a) The tax dispute is related to the Management Assistance Agreement ("MAA") fees paid to VCL which the Director General of Tax has assessed to be dividends and therefore not deductible for taxable income and subject to WHT Article 26. Specifically, for the 2010 fiscal year case, the tax assessment also includes the payment of Technical Assistance Agreement ("TAA") fees to VCL. The Company does not agree with these assessments.

The outstanding disputes in the amount of US\$22.1 million (full amount) are currently in the appeal process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with the Double Tax Avoidance Agreement ("DTAA") between the Indonesian and Canadian Tax Authorities.

Specifically, for the fiscal year 2004, the Company also believes that the tax assessment letter which was issued on February 22, 2011, has exceeded the five-year time limit in accordance with the DTAA. For the disputed amount of US\$1.9 million (full amount) for the fiscal year 2008, the reconsideration letter to the Supreme Court was rejected by the Supreme Court in 2020 and this amount has been written off.

- b) The tax dispute is on expenses related to a loan agreement in the amount of US\$1.3 million (full amount) which was considered non-deductible for the taxable income calculation.

The Company believes that the expenses related to securing loans which were used to fund the Company's main business of processing nickel, should be treated as deductible in the taxable income calculation, in accordance with prevailing regulations and the CoW. The dispute is still in the reconsideration process at the Supreme Court.

- c) The tax dispute for expenses related to cost of project development, Technical Academy of Sorowako, Management and Technical Services, royalty, guarantee fee, consultancy, freight charges, consignment stock, other contributions, and donations was for a total correction amount of US\$4.6 million (full amount). The Company filed an objection to these disputed amounts. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal letter to the Tax Court. For Withholding Tax ("WHT") article 23 dispute regarding services which were deemed not to have had the WHT deducted in the amount of US\$811 thousand (full amount), the Tax Court has fully accepted the appeal submitted by the Company. While for corporate income tax the Tax Court partially accepted the appeal in the amount of US\$2.2 million (full amount) and rejected for royalty expense only in the amount of US\$1.6 million (full amount). The Company will submit a restitution application letter and will consider for reconsideration to the Supreme Court on the royalty case.

- d) The tax dispute is related mostly with the slag usage on the mining road and offshore services with total disputed amount of US\$17.6 million (full amount). The Company partially agreed and has paid IDR2.5 billion or equivalent to US\$0.2 million (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

In 2018, the Company paid 50% of the remaining balance and has filed an objection. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal to the Tax Court. The Tax Court has issued a decision related to the offshore services dispute which fully accepted the Company's appeal request. The Tax Court has decided related to VAT on Offshore services cases and accepted the Company's appeal, while for the VAT Collection cases was rejected. The formal verdicts have just been received in January 2021, and therefore the Company will submit a refund request in the amount of US\$2.2 million (full amount), while for the rejected cases the Company will pay for the remaining unpaid amount of US\$31.6 thousand with an additional 100% penalty of US\$31.6 thousand (full amount). The Tax Court decision with respect to the slag usage on the mining road is still pending.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

- e) Sengketa terkait koreksi atas peredaran usaha, biaya-biaya pengembangan proyek, jaminan hutang, royalti dan biaya-biaya yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Koreksi atas peredaran usaha juga dianggap sebagai deviden sehingga dijadikan obyek koreksi untuk PPh Pasal 26. Koreksi lainnya adalah PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden yang dipertimbangkan adalah menggunakan tarif pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah sebesar AS\$62,4 juta (nilai penuh).

Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar AS\$40,0 ribu (nilai penuh) serta telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Di 2018, Perseroan telah membayar sebagian yaitu sejumlah AS\$49,4 juta (nilai penuh), dan Perseroan tidak melakukan pembayaran atas koreksi sebesar AS\$12,9 juta (nilai penuh) koreksi PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden kepada Pemegang Saham Pendiri yang dianggap kurang potong karena dianggap salah menggunakan tarif pajak dan Perseroan telah mengajukan keberatan. Keberatan tersebut ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Namun Direktur Jenderal Pajak secara sepihak melakukan kompensasi atas lebih bayar PPh Badan Tahun 2017 sebesar AS\$6,9 juta dan restitusi PPN bulan Mei 2018 sebesar AS\$3,5 juta kepada nilai sengketa PPh Pasal 26 yang tidak disetujui Perseroan tersebut. Perseroan sedang berupaya untuk mendapatkan kembali lebih bayar PPh Badan Tahun 2017 dan restitusi PPN bulan Mei 2018 yang dikompensasikan karena sengketa pajak ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Pajak.

- f) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Service Agreement* ("MSA") dan *Technical Service Agreement* ("TSA") kepada VCL dan Vale Technology Development (Canada) Limited ("VTDCL") yang dianggap sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sengketa ini juga terkait dengan biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya jaminan hutang dan biaya-biaya lain yang dianggap tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah AS\$10,3 juta (nilai penuh). Untuk tahun pajak 2016 dan 2017, keberatan Perseroan telah ditolak dan Perseroan telah mengajukan banding atas koreksi-koreksi tersebut.
- g) Sengketa terkait dugaan kurang bayar royalti kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penjualan nikel *matte* untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 karena ketidaktepatan dalam mengenakan tarif.

Jumlah koreksi-koreksi tersebut AS\$1,0 juta (nilai penuh). Perseroan tidak setuju atas koreksi-koreksi ini dan telah mengajukan keberatan. Perseroan telah menerima Surat Keputusan Keberatan yang menolak keberatan Perseroan, dan telah pula mengajukan gugatan dan telah disetujui oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN"). Sengketa ini berlanjut ke proses Kasasi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh Tergugat dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menolak kasasi Tergugat. Perseroan akan mengajukan permohonan restitusi.

- h) Sengketa terkait dengan pembayaran jasa *Management Service Agreement* ("MSA"), *Technical Service Agreement* ("TSA") dan *Guarantee Fee* kepada VCL, VTDCL dan Vale S.A yang dianggap sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut AS\$2,9 juta (nilai penuh). Perseroan telah mengajukan keberatan untuk kedua koreksi PPh Badan 2018 sejumlah AS\$2,9 juta (nilai penuh) dan koreksi PPh Pasal 26 sejumlah AS\$0,6 juta (nilai penuh).

15. Akrual

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Barang dan jasa	15,172	11,448	Goods and services
Barang modal	3,640	1,449	Capital items
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	3,293	3,430	Royalties, water levy, land rent and others
Jumlah	22,105	16,327	Total

Lihat Catatan 32 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

- e) The tax disputes are related to adjustment on revenue, project development costs, guarantee fee, royalty, other expenses which are considered by the Director General of Tax to be non-deductible expenses.

The adjustment to revenue is also deemed as a dividend subject to WHT article 26. The other WHT article 26 adjustment is related to under-withheld WHT article 26 on dividend payment which was considered to have used the incorrect WHT rate. The total adjustments amount to US\$62.4 million (full amount).

The Company partially agreed and paid US\$40.0 thousand (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

In 2018, the Company partially paid the amount of US\$49.4 million (full amount) with the exception of a disputed amount of US\$12.9 million (full amount) on WHT article 26 adjustment in relation to under-withheld dividend payment to the Founding Shareholders, and the Company has filed objection letters on these disputes. The objections were rejected by the Director General of Tax and the Company has filed appeals to the Tax Court. However, the Director General of Tax has unilaterally offset the 2017 CIT overpayment of US\$6.9 million and VAT refund for May 2018 period of US\$3.5 million against this WHT article 26 which was not agreed to by the Company. The Company is following up to obtain back the 2017 CIT overpayment and VAT refund for May 2018 period which were offset, as the dispute is still in the Tax Court process.

- f) The tax dispute is related to the payment of Management Service Agreement ("MSA") and Technical Service Agreement ("TSA") fees to VCL and Vale Technology Development (Canada) Limited ("VTDCL") which were deemed to be dividends, and therefore non-deductible against taxable income. The disputes were also related to cost of project development, guarantee fees and other expenses which are deemed to be non-deductible expenses. The total adjustment is US\$10.3 million (full amount). For the fiscal years 2016 and 2017, the Company's objection was rejected and the Company has filed an appeal on this dispute.
- g) The dispute is related to an alleged underpayment of royalty to the Government of the Republic of Indonesia on nickel *matte* sales for the years 2014 to 2016 due to incorrect rate used.

The total adjustment is US\$1.0 million (full amount). The Company does not agree with the adjustment and filed an objection on this dispute. The Company received the Objection Decision Letter that rejected the Objection, and the Company has filed a law suit and it has been approved by the State Administrative High Court ("PTTUN"). This dispute is continued to the Supreme Court for Cassation that has been proposed by the Defendant, and the Supreme Court rejected this Cassation. The Company will submit a restitution application letter.

- h) This tax dispute is related to the payment of Management Service Agreement ("MSA"), Technical Service Agreement ("TSA") and Guarantee Fee to VCL, VTDCL and Vale S.A. which were deemed to be dividends and therefore non-deductible against taxable income. The total adjustment is US\$2.9 million (full amount). The Company has filed objections for both the Corporate Income Tax 2018 adjustment in the amount of US\$2.9 million (full amount) and the related withholding tax article 26 adjustment in the amount of US\$0.6 million (full amount).

15. Accruals

31 Desember	2020	2019	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Barang dan jasa	15,172	11,448	Goods and services
Barang modal	3,640	1,449	Capital items
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	3,293	3,430	Royalties, water levy, land rent and others
Jumlah	22,105	16,327	Total

Refer to Note 32 for details of related party balances and transactions.

15. Akrual (lanjutan)

Perubahan akrual atas biaya keuangan yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	-	708	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Pembayaran atas bunga	-	(849)	Payments of interest
Pembayaran atas biaya jaminan garansi	-	(315)	Payments of guarantee fee
	-	(1,164)	
Perubahan non kas:			Non-cash changes:
Akrual biaya bunga	-	333	Accrued interest expense
Akrual biaya jaminan dan agen	-	123	Accrued guarantee and agency fee
	-	456	
Saldo akhir	-	-	Ending balance

15. Accruals (continued)

The movement in accruals of finance costs arising from financing activities is as follows:

16. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Utang dividen	311	556	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	2,087	3,197	Other non-operational payables
Jumlah	2,398	3,753	Total

16. Other current financial liabilities

17. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	20,465	15,563	Salaries, wages and other employee benefits

17. Short-term employee benefit liabilities

18. Liabilitas imbalan pascakerja

Program dana pensiun untuk karyawan Grup adalah program *defined contribution* dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang ditunjuk oleh Grup.

Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, Grup diharuskan memberikan imbalan pascakerja tertentu kepada karyawannya saat diberhentikan atau saat mereka pensiun. Manfaat ini terutama didasarkan pada masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penghentian atau masa pensiun.

Liabilitas atas imbalan kerja pada 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris yang berkualifikasi pada laporannya tertanggal 18 Januari 2021 (31 Desember 2019: 12 Februari 2020).

Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	15,022	11,366	Pension and Labor Law benefits
Imbalan kesehatan pascakerja	11,764	8,053	Post-retirement medical benefits
Jumlah	26,786	19,419	Total

18. Post-employment benefit liabilities

The pension plan fund for the Group's employees is a defined contribution plan that is managed by a pension fund financial institution ("DPLK") appointed by the Group.

In accordance with Indonesian labor regulations, the Group is required to provide certain post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The employee benefit liabilities as at December 31, 2020 and 2019 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, a qualified actuary with its reports dated January 18, 2021 (December 31, 2019: February 12, 2020).

The liability in the consolidated statements of financial position consists of:

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		December 31
	2020	2019	2020	2019	
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:
Tingkat diskonto (IDR)	6.25%	7.50%	6.75%	7.75%	Discount rate (IDR)
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	6.00%	6.00%	N/A	N/A	Future salary increases (IDR)
Tingkat kenaikan klaim di masa depan (IDR)	N/A	N/A	11.00%	11.00%	Future claim increase rate (IDR)
Asumsi lainnya:		2020		2019	Other assumptions:
Tingkat mortalita		TMI 2019		TMI 2011	Rates of mortality
Tingkat cacat		10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate	Disability rate
Usia pensiun normal		55 tahun/years		55 tahun/years	Normal retirement age

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto, biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah yang ada di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan.

Asumsi tingkat kenaikan upah di masa depan memproyeksikan kewajiban imbalan kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

Asumsi tentang bagaimana klaim akan meningkat di masa depan dikenal sebagai tingkat kenaikan klaim. Tren biaya klaim di masa mendatang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemanfaatan, inflasi umum, perkembangan medis, dan ketersediaan pelayanan medis. Pada umumnya, biaya klaim meningkat lebih cepat daripada tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 31 Desember 2020, durasi rata-rata tertimbang atas kewajiban iuran pasti untuk imbalan pensiun adalah 8,65 tahun (31 Desember 2019: 9,39 tahun) dan imbalan kesehatan pascakerja adalah 14,34 tahun (31 Desember 2019: 12,51 tahun).

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

The principal actuarial assumptions used were as follows:

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availability of government bonds in the active capital market at the reporting date.

The future salary-increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date up to the normal retirement age. The rate of salary increase is generally determined based on inflation adjustments to pay scales and increases in length of service.

The actuarial assumptions also factor in how future claims will increase which is influenced by several factors such as utilisation, general inflation, medical developments, and availability of medical services. Generally, the claim costs have risen faster than price inflation in recent years.

As of December 31, 2020, the weighted average duration of the defined contribution obligation for pension benefits was 8.65 years (December 31, 2019: 9.39 years) and post-retirement medical benefits was 14.34 years (December 31, 2019: 12.51 years).

The movement in post-employment benefits obligation over the year is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		December 31
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	11,366	6,669	8,053	8,209	19,419	14,878	At beginning of year
Diakui di laba rugi							Recognised in profit or loss
- Biaya jasa kini	1,274	647	-	2	1,274	649	- Current service cost
- Biaya bunga	831	552	605	683	1,436	1,235	- Interest cost
- Biaya jasa lalu	-	3,388	-	-	-	3,388	- Past service cost
Diakui di penghasilan komprehensif lain							Recognised in other comprehensive income
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	1,302	(229)	1,446	(203)	2,748	(432)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	781	469	(941)	(792)	(160)	(323)	- Experience adjustments
- Asumsi demografis*	29	-	2,684	-	2,713	-	- Demographic assumptions*
Lain-lain							Others
- Pembayaran manfaat	(444)	(513)	(71)	(71)	(515)	(584)	- Benefits paid
- Pengaruh perbedaan dalam pelaporan mata uang	(117)	383	(12)	225	(129)	608	- Effect of difference in reporting currency
Liabilitas imbalan pascakerja, akhir tahun	15,022	11,366	11,764	8,053	26,786	19,419	Post-employment benefit liabilities, end of year

*Hasil dari pembaharuan tabel mortalita yang digunakan di tahun 2020 dari TMI 2011 menjadi TMI 2019.

*Results from the update in mortality rate tables used in 2020 from TMI 2011 to TMI 2019.

Biaya jasa lalu yang diakui di tahun 2019 disebabkan oleh perubahan manfaat sesuai dengan PKB tahun 2018-2020 yang telah disahkan di tanggal 11 November 2019.

Past service cost recognised in 2019 was due to changes in benefits in accordance with the 2018-2020 CLA which was ratified on November 11, 2019.

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Jumlah kumulatif kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Total cumulative actuarial loss/(gain) recognised in other comprehensive income is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		December 31
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	(1,434)	(1,674)	1,936	2,931	502	1,257	At beginning of year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan							Other comprehensive income for the year
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	1,302	(229)	1,446	(203)	2,748	(432)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	781	469	(941)	(792)	(160)	(323)	- Experience adjustments
- Asumsi demografis	29	-	2,684	-	2,713	-	- Demographic assumptions
Jumlah kumulatif kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	678	(1,434)	5,125	1,936	5,803	502	Total cumulative actuarial loss/(gain) recognised in other comprehensive income

Uran ke DPLK selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Contributions to DPLK over the year are as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Oleh Grup	2,918	2,760	By the Group
Oleh karyawan	610	578	By employees
Jumlah	3,528	3,338	Total

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and post-retirement medical benefits, is as follows:

31 Desember 2020	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>	Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2020
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Kurang dari 1 tahun	809	383	1,192	Less than 1 year
1 sampai dengan 10 tahun	15,912	5,859	21,771	1 – 10 years
Lebih dari 10 tahun	37,867	32,848	70,715	More than 10 years
Jumlah	54,588	39,090	93,678	Total

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five years history of experience adjustments is as follows:

	2020	2019	2018	2017	2016	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(26,786)	(19,419)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(26,786)	(19,419)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	-	-	-	-	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(160)	(323)	(2,304)	(882)	447	Experience adjustments on plan liabilities

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Jika asumsi yang digunakan berbeda dari estimasi manajemen, nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasi sebagai berikut:

31 Desember 2020	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	December 31, 2020
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(1,140)	(845)	Discount rate
	-1%	1,273	1,018	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	613	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(579)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	975	Future claim increase rate
	-1%	-	(830)	

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

If the assumptions differed from management's estimates, the carrying amount of pension obligations would be as follows:

31 Desember 2019	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(905)	(854)	Discount rate
	-1%	1,025	1,028	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	543	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(501)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	986	Future claim increase rate
	-1%	-	(838)	

19. Modal saham

Pemegang saham Perseroan dan jumlah kepemilikan saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2020
VCL Publik	4,351,403,820	59,738	43.79	VCL Publik
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	2,036,346,880	27,957	20.49	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	1,987,267,745	27,283	20.00	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
Vale Japan Limited	1,493,218,075	20,500	15.03	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	54,083,720	743	0.55	Sumitomo Corporation
	14,018,480	192	0.14	
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

19. Share capital

The Company's shareholders and number of shares at the par value of IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2020 and 2019 were as follows:

31 Desember 2019	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2019
VCL Publik	5,835,607,960	80,115	58.73	VCL Publik
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	2,036,346,880	27,957	20.49	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
Vale Japan Limited	1,996,281,680	27,406	20.09	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	54,083,720	743	0.55	Sumitomo Corporation
	14,018,480	192	0.14	
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Lihat Catatan 38j untuk informasi perubahan struktur pemegang saham di tahun 2020.

No public shareholder owned more than 5% of the total issued and fully paid shares at December 31, 2020 and 2019. Refer to Note 38j for the information regarding changes in shareholders structure in 2020.

20. Deklarasi dividen

Perseroan tidak mendeklarasikan dividen selama tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

20. Dividends declared

The Company did not declare dividends during the years ended December 31, 2020 and 2019.

21. Tambahan modal disetor

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,8 juta (31 Desember 2019: AS\$277,8 juta) (nilai penuh) yang merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham Perseroan di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983.

22. Cadangan modal

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Grup wajib membentuk cadangan umum sebesar minimum 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Perseroan adalah sebesar IDR248,4 miliar atau setara dengan AS\$136,4 juta (nilai penuh); sehingga, cadangan umum minimum yang disyaratkan bagi Grup adalah sebesar AS\$27,3 juta (nilai penuh).

Jumlah cadangan umum minimum Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah terpenuhi.

23. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Depresiasi	148,747	132,184	Depreciation
Bahan pembantu	128,810	120,849	Supplies
Jasa kontraktor	104,008	92,897	Contractors' services
Bahan bakar minyak dan pelumas	87,932	146,376	Fuels and lubricants
Biaya karyawan	74,503	79,691	Employee costs
Bahan bakar batubara	42,144	44,383	Coal
Pajak dan asuransi	31,517	29,838	Taxes and insurance
Royalti	15,505	15,862	Royalties
Lainnya	7,440	9,341	Others
	640,606	671,421	
Persediaan dalam proses			In-process inventory
Persediaan awal	55,452	48,962	Beginning balance
Persediaan akhir	(49,493)	(55,452)	Ending balance
Beban pokok produksi	646,565	664,931	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	13,212	12,604	Beginning balance
Persediaan akhir	(19,412)	(13,212)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	640,365	664,323	Cost of revenue

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 32 for details of related party transactions.

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan:

Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total cost of revenue:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pihak ketiga			Third parties
PT Pertamina (Persero)	63,756	66,813	PT Pertamina (Persero)

24. Beban usaha

Rincian beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

24. Operating expenses

The components of operating expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya jasa profesional	2,467	2,827	Professional fees
Biaya karyawan	2,144	3,296	Employee costs
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	776	6,272	Management service, license and royalty fees
Lainnya	1,998	1,335	Others
Jumlah	7,385	13,730	Total

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 32 for details of related party transactions.

25. Pendapatan lainnya

Rincian pendapatan lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Laba selisih kurs, neto	5,827	1,141	Gain on currency translation adjustments, net
Bunga dari piutang perpanjangan waktu pembayaran piutang	-	1,426	Interest on extended payment terms of trade receivables
Lainnya (di bawah AS\$ 1,000)	1,275	699	Others (below US\$1,000)
Jumlah	7,102	3,266	Total

25. Other income

The components of other income for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

26. Beban lainnya

Rincian beban lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Rugi pelepasan aset tetap, bersih	10,438	4,887	Loss on disposal of fixed assets, net
Biaya karyawan	2,800	2,344	Employment costs
Biaya pengembangan proyek	512	3,807	Project development costs
Beban pajak	317	2,200	Tax expenses
Lainnya (di bawah AS\$ 1,000)	6,175	4,463	Others (below US\$1,000)
Jumlah	20,242	17,701	Total

26. Other expenses

The components of other expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

Beban lainnya adalah beban yang berhubungan dengan dari kegiatan non-operasional Grup, antara lain, rugi pelepasan aset tetap, biaya pengembangan proyek, pembayaran kepada karyawan, beban yang dikeluarkan perusahaan terkait wabah Coronavirus ("COVID-19").

Other expenses are expenses related to the Group's non-operational activities, among others, loss on disposal of fixed assets, project development costs, employee costs, expenses related to the Coronavirus outbreak ("COVID-19").

27. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	44,361	37,833	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	11,436	2,606	Provisions made during the year
Beban akresi	2,071	2,324	Accretion expense
Dampak perubahan selisih kurs	(1,265)	1,598	Effect of exchange rate differences
Saldo akhir	56,603	44,361	Ending balance

27. Provision for asset retirement

Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Accretion expense is recognised as part of finance costs in profit or loss.

Grup mengakui provisi atas biaya penghentian pengoperasian aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar IDR794,9 miliar atau setara dengan AS\$56,6 juta (nilai penuh) (31 Desember 2019: IDR616,5 miliar atau setara dengan AS\$44,4 juta) (nilai penuh). Biaya ini diperkirakan akan terjadi antara tahun 2045 dan 2060. Provisi tersebut diestimasi berdasarkan biaya penutupan menggunakan teknologi dan material yang tersedia sekarang, pada tingkat harga kini, dan didiskontokan menggunakan tingkat diskonto bebas risiko di Indonesia sebesar 4,23% (31 Desember 2019: 4,78%).

The Group recognises a provision for asset retirement cost as at December 31, 2020 of IDR794.9 billion or equivalent to US\$56.6 million (full amount) (December 31, 2019: IDR616.5 billion or equivalent to US\$44.4 million) (full amount)). This cost is expected to be incurred between 2045 and 2060. The provision is estimated based on closure costs using existing technology and materials that are currently available, at the current price level, and discounted using the Indonesian risk-free rate of 4.23% (December 31, 2019: 4.78%).

Grup dibantu oleh PT ERM Indonesia, konsultan lingkungan yang berkualifikasi, dalam menghitung biaya penutupan operasi Perseroan di Sulawesi sehubungan dengan Rencana Penutupan Tambang. Perhitungan biaya penutupan tambang meliputi asumsi umur aset berdasarkan ketentuan KK (lihat Catatan 1) disesuaikan dengan perpanjangan yang diasumsikan, untuk penyelesaian operasi penambangan yang diikuti dengan penutupan pabrik pengolahan setelah penipisan sisa tumpukan bijih.

The Group is assisted by PT ERM Indonesia, a qualified environmental consultant, in calculating the closure costs of the Company's operations in Sulawesi in conjunction with the Mine Closure Plan. The closure cost calculation includes the assumption of asset life in accordance with the term of the CoW (refer to Note 1) adjusted for assumed extensions, for completion of mining operations closely followed by shutdown of the processing plant after depletion of residual ore stockpiles.

28. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Grup di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung termasuk penghijauan daerah purna tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan pada laba rugi adalah sebesar AS\$5,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (31 Desember 2019: AS\$4,8 juta) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$36,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (31 Desember 2019: AS\$40,8 juta) (nilai penuh).

29. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar AS\$79,4 juta (31 Desember 2019: AS\$86,6 juta) (nilai penuh).

30. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham)		(US Dollars, in thousands, except earnings per share)	
Jumlah laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham entitas induk	82,819	57,400	Total profit for the year attributable to the shareholders of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Laba per saham dasar (dalam AS\$)	0.0083	0.0058	Basic earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

31. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
PT Indominco Mandiri	Pembelian batubara/ Purchase of coal	01 Februari 2020 - 31 Desember 2020*/ February 1, 2020 - December 31, 2020*
PT Pertamina (Persero)	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)	11 Agustus 2019 - 10 April 2022/ August 11, 2019 - April 10, 2022
PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ Purchase of High Speed Diesel (HSD)	1 Juli 2019 - 30 September 2022/ July 1, 2019 - September 30, 2022
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batubara/ Purchase of coal	31 Januari 2019 - 31 Desember 2020*/ January 31, 2019 - December 31, 2020*
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ Purchase of spare parts	1 Juni 2020 - 31 Desember 2023/ June 1, 2020 - December 31, 2023
PT Cipta Krida Bahari	Jasa freight forwarding global/ Global freight forwarding	1 Mei 2015 - 30 Juni 2021/ May 1, 2015 - June 30, 2021

* Sedang dalam proses perpanjangan

* In process of extension

28. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan.

For the year ended December 31, 2020, a number of initiatives, representing part of the Group's commitments under these plans, were completed while others were still in progress including the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to profit or loss were US\$5.2 million for the year ended December 31, 2020 (December 31, 2019: US\$4.8 million) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$36.7 million for the year ended December 31, 2020 (December 31, 2019: US\$40.8 million) (full amount).

29. Employee costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2020 amounted to US\$79.4 million (December 31, 2019: US\$86.6 million) (full amount).

30. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing total profit attributable to the shareholders of the parent entity by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

As at December 31, 2020 and 2019 there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

31. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below:

31. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Grup memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya modal dengan pemasok pihak ketiga sebagai berikut:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Tidak lebih dari 1 tahun	458,109	284,792	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	184,118	29,867	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	32	-	Later than 5 years
Jumlah	642,259	314,659	Total

Pengeluaran modal yang telah diperjanjikan pada akhir tahun pelaporan namun belum diakui sebagai liabilitas adalah senilai AS\$5,9 juta (31 Desember 2019: AS\$3,3 juta) (nilai penuh).

As at December 31, 2020 and 2019, the Group had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenditure with third party suppliers, as follows:

Capital expenditure contracted for at the end of the reporting year but not yet recognised as liabilities is amounted to US\$5.9 million (December 31, 2019: US\$3.3 million) (full amount).

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup memiliki sewa berikut yang diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas terkait:

As at December 31, 2020, the Group has the following leases recognized as right-of-use assets and a corresponding liability:

<u>Pihak dalam perjanjian/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/ Agreement type</u>	<u>Periode perjanjian/ Agreement period</u>
PT Api Metra Graha	Sewa Gedung Kantor Jakarta/ <i>Rental Building for Jakarta Office</i>	2 November 2015 - 30 September 2021/ <i>November 2, 2015 - September 30, 2021</i>
PT Sinar Jaya Langgeng Utama	Sewa Bus Transportasi/ <i>Rental Bus Transportation</i>	5 April 2019 - 31 March 2021/ <i>April 5, 2019 - March 31, 2021</i>
PT Sinar Jaya Langgeng Utama	Sewa Bus Transportasi/ <i>Rental Bus Transportation</i>	1 April 2021 - 15 Agustus 2025/ <i>April 1, 2021 - August 15, 2025</i>

32. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi

Grup berada di bawah pengendalian VCL. Pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

32. Related party information

The Group is controlled by VCL. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

a. Pendapatan dan pendapatan lainnya

Pendapatan

Seluruh penjualan Grup dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, dimana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di LME dan harga realisasi rata-rata nikel VCL. Semua penjualan Grup merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

a. Revenue and other income

Revenue

The Group's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the LME cash price for nickel and VCL's average net realised price for nickel. All of the Group's sales represent transactions with related parties.

Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Revenue for the years ended December 31, 2020 and 2019 consisted of:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Penjualan kepada VCL	612,046	625,429	Sales to VCL
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")	152,698	156,583	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")
Jumlah	764,744	782,012	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	100%	100%	(Sales to related parties as a percentage of total revenue)

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Other income

Other income from related parties for the years ended December 31, 2020 and 2019 consisted of:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	-	1,426	VCL
(Persentase terhadap jumlah pendapatan lainnya)	-	43.66%	(As a percentage of total other income)

32. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

32. Related party information (continued)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Grup.

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Group.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to the Boards of Commissioners and Directors is shown below:

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020/
For the year ended December 31, 2020

(Dalam ribuan Dolar AS)/ (US Dollars, in thousands)	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.3%	240	3.7%	2,921
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.3%	222
Jumlah/Total	0.3%	240	4.0%	3,143

*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019/
For the year ended December 31, 2019

(Dalam ribuan Dolar AS)/ (US Dollars, in thousands)	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.2%	177	3.7%	3,158
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.2%	205
Jumlah/Total	0.2%	177	3.9%	3,363

*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

c. Beban jasa manajemen dan lisensi

c. Management service and license fees

Beban untuk biaya jasa manajemen dan lisensi disajikan sebagai beban usaha (lihat Catatan 24) dalam laba rugi. Berdasarkan perjanjian yang relevan, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%.

Management service and license fees are presented as operating expenses (refer to Note 24) in profit or loss. Based on the relevant agreement, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%.

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	776	6,272	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	10.5%	45.7%	(As a percentage of total operating expenses)

d. Beban lainnya

d. Other costs

Di beban pokok pendapatan

In cost of revenue

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Jasa professional dan tagihan atau beban yang dibayarkan atas nama Perseroan: VCL	2,220	3,614	Professional services and expense reimbursement paid on behalf of the Company: VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.4%	0.5%	(As a percentage of total cost of revenue)

Di biaya keuangan

In finance costs

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya jaminan: Vale S.A.	-	154	Guarantee fee: Vale S.A.
(Sebagai persentase terhadap jumlah biaya keuangan)	-	3.9%	(As a percentage of total finance costs)

32. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

32. Related party information (continued)

d. Beban lainnya (lanjutan)

d. Other costs (continued)

Tidak terdapat beban lainnya terkait biaya keuangan di antara pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (December 31, 2019: AS\$0,2 juta). Biaya yang terjadi pada 2019 berkaitan dengan perjanjian di mana Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, setuju untuk menjamin fasilitas utang yang diterima Perseroan.

There are no finance related other costs incurred between the related parties for the year ended December 31, 2020 (December 31, 2019: US\$0.2 million). Costs incurred in 2019 were related to an agreement whereby Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, agreed to guarantee a debt facility obtained by the Company.

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	48,389	71,335	VCL
SMM	11,651	35,960	SMM
Jumlah	60,040	107,295	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di atas IDR1 miliar	-	99	Loans to key management personnel above IDR1 billion
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di bawah IDR1 miliar	58	87	Loans to key management personnel below IDR1 billion
Pinjaman kepada personil manajemen kunci	58	186	Loans to key management personnel
Dikurangi: Bagian tidak lancar	(18)	(58)	Less: Non-current portion
Bagian lancar	40	128	Current portion
(Sebagai persentase terhadap aset keuangan lancar lainnya)	1.6%	4.7%	(As a percentage of other current financial assets)

Piutang bunga dan bagian lancar dari pinjaman kepada personil manajemen kunci akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai aset lancar.

Interest receivables and current portion of loans to key management personnel will be settled within one year; therefore, they are presented as current assets.

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

iii) Non-trade receivables from related parties

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada personil manajemen kunci - tidak lancar	18	58	Loans to key management personnel - non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset (piutang usaha (i), aset keuangan lancar lainnya (ii), dan piutang pihak berelasi non-usaha (iii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	60,098	107,481	Total assets (trade receivables (i), other current financial assets (ii), and non-trade receivables from related parties (iii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	2.6%	4.8%	(As a percentage of total assets)

32. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

32. Related party information (continued)

f. Liabilitas

f. Liabilities

i) Utang usaha

i) Trade payables

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	140	2,071	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)		(As a percentage of total trade payables)	
	0.1%	2.1%	

ii) Akruai

ii) Accruals

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	95	276	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)		(As a percentage of total accruals)	
	0.4%	1.7%	
Jumlah liabilitas (utang usaha (i) dan akrual (ii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	235	2,347	Total liabilities (trade payables (i) and accruals (ii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)		(As a percentage of total liabilities)	
	0.1%	0.8%	

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of relationship with the related parties	Transaksi/ Transactions
VCL	Perusahaan induk/Parent entity	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen dan lisensi (lihat Catatan 32a, 32c, dan 32d)/Sale of finished goods; Professional services; Management Service and license fees (refer to Notes 32a, 32c, and 32d)
SMM	Pemegang saham/Shareholder	Penjualan barang jadi (lihat Catatan 32a)/Sale of finished goods (refer to Note 32a)
Manajemen kunci/Key management	Personil manajemen kunci (yaitu Dewan Komisaris dan Direksi)/Key management personnel (i.e. Board of Commissioners and Board of Directors)	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi (lihat Catatan 32b dan 32e)/Compensation and remuneration; housing and personal loans (refer to Notes 32b and 32e)

33. Biaya keuangan

33. Finance costs

Rincian biaya keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The components of finance costs for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Beban akresi (Catatan 27)	2,071	2,324	Accretion expense (Note 27)
Biaya bunga	1,610	1,673	Interest expense
Biaya agen dan amortisasi biaya pinjaman	-	996	Agency fee and amortisation of debt issuance costs
Biaya jaminan	-	154	Guarantee fee
Jumlah	3,681	5,147	Total

34. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

34. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2020 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR14.044 (31 Desember 2019: IDR13.897).

As at December 31, 2020 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR14,044 (December 31, 2019: IDR13,897).

31 Desember	2020		December 31	
	Mata Uang Asing (Jutaan/ Foreign Currencies (Millions))	Setara AS\$ (Ribuan/ US\$ Equivalent (Thousands))		
Aset			Assets	
Kas dan setara kas	IDR	320,178	Cash and cash equivalents	
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	23,888	Other current financial assets	
Pajak dibayar di muka	IDR	1,202,186	Prepaid taxes	
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	253	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	60,682	Other non-current financial assets	
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing		114,443	Total monetary assets in foreign currencies	
Liabilitas			Liabilities	
Utang usaha			Trade payables	
Pihak ketiga	IDR	(818,189)	Third parties	
Others		(18)		
Akrual	IDR	(171,907)	Accruals	
Utang pajak	IDR	(25,184)	Taxes payable	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(287,400)	Short-term employee benefit liabilities	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(33,676)	Other current financial liabilities	
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(794,904)	Provision for asset retirement	
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(376,169)	Post-employment benefit liabilities	
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		(187,624)	Total monetary liabilities in foreign currencies	
Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing		(73,181)	Net monetary liabilities in foreign currencies	

31 Desember	2019		December 31	
	Mata Uang Asing (Jutaan/ Foreign Currencies (Millions))	Setara AS\$ (Ribuan/ US\$ Equivalent (Thousands))		
Aset			Assets	
Kas dan setara kas	IDR	287,013	Cash and cash equivalents	
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	23,152	Other current financial assets	
Pajak dibayar di muka	IDR	1,664,751	Prepaid taxes	
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	806	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	64,245	Other non-current financial assets	
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing		146,793	Total monetary assets in foreign currencies	
Liabilitas			Liabilities	
Utang usaha			Trade payables	
Pihak ketiga	IDR	(877,339)	Third parties	
Others		(10)		
Akrual	IDR	(165,985)	Accruals	
Utang pajak	IDR	(24,649)	Taxes payable	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(216,277)	Short-term employee benefit liabilities	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(52,225)	Other current financial liabilities	
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(616,480)	Provision for asset retirement	
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(269,864)	Post-employment benefit liabilities	
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		(165,450)	Total monetary liabilities in foreign currencies	
Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing		(18,657)	Net monetary liabilities in foreign currencies	

Grup tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Grup dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami.

The Group does not hedge the risk of fluctuations in the exchange rate of Rupiah since all sales and the majority of the Group's expenses are transacted in US Dollars which indirectly represents a natural hedge.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika Dolar AS melemah/menguat sebesar 3% terhadap Rupiah dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar AS\$2,3 juta (nilai penuh).

As at December 31, 2020, if the US Dollar had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, pre-tax gain for the year would have been US\$2.3 million (full amount) higher/lower.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal laporan ini, maka liabilitas neto dalam mata uang asing Grup nilai akan turun sekitar AS\$ 278.

If assets and liabilities in foreign currencies as at 31 December 2020 had been translated using the closing rates as at the date of this report, the total net foreign currency liabilities of the Group would decrease by approximately US\$ 278.

35. Informasi segmen

Grup beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Grup dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 32a).

Seluruh penjualan Grup merupakan penjualan nikel kepada pihak-pihak berelasi yang berdomisili di Kanada (VCL) dan Jepang (SMM) (lihat Catatan 32a).

36. Aset dan liabilitas keuangan

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan Grup berdasarkan kategori akun:

35. Segment information

The Group operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Group's products are delivered under long-term sales contracts (refer to Note 32a).

All of the Group's sales represent nickel sales to related parties domiciled in Canada (VCL) and Japan (SMM) (refer to Note 32a).

36. Financial assets and liabilities

The information given below relates to the Group's financial assets and liabilities by category:

31 Desember 2020	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan/ Financial assets Jumlah/ Total	measured at amortised cost	Nilai wajar diakui pada laba rugi Fair value through profit or loss	Nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ Fair value through other comprehensive income	December 31, 2020
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	388,682	388,682	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	30,612	30,612	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	60,040	60,040	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,512	2,512	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	18	18	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	4,321	4,321	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	486,185	486,185	-	-	Total financial assets

31 Desember 2019	Aset keuangan	diukur pada biaya perolehan/ Financial assets	Jumlah/ Total	measured at amortised cost	Nilai wajar diakui pada laba rugi/ Fair value through profit or loss	Nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ Fair value through other comprehensive income	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Aset keuangan:							Financial assets:
Kas dan setara kas	249,035	249,035	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	15,412	15,412	-	-	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	107,295	107,295	-	-	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,754	2,754	-	-	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	58	58	-	-	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	4,623	4,623	-	-	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	379,177	379,177	-	-	-	-	Total financial assets

31 Desember 2020	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	December 31, 2020	
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha	113,095	-	113,095	Trade payables	
Akrual	22,105	-	22,105	Accruals	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	2,398	-	2,398	Other current financial liabilities	
Liabilitas sewa	66	-	66	Lease liabilities	
Jumlah liabilitas keuangan	137,664	-	137,664	Total financial liabilities	

31 Desember 2019	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha	97,408	-	97,408	Trade payables	
Akrual	16,327	-	16,327	Accruals	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	3,753	-	3,753	Other current financial liabilities	
Liabilitas sewa	1,120	-	1,120	Lease liabilities	
Jumlah liabilitas keuangan	118,608	-	118,608	Total financial liabilities	

37. Pengelolaan risiko keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Grup berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Grup.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Pada tanggal 31 Desember 2020, struktur modal Grup didanai oleh ekuitas pemegang saham.

Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar

Penjualan dan mayoritas pengeluaran operasional Grup dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Lihat Catatan 34 untuk rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS.

(ii) Risiko harga

Grup terpengaruh oleh fluktuasi harga nikel, batubara dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh secara negatif oleh harga nikel, batu bara dan bahan bakar, yang bergantung dari tingkat permintaan dan penawaran dunia. Grup mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jika harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 15%, dengan semua variabel lain tetap, laba sebelum pajak Grup meningkat/menurun sebesar AS\$114,7 juta (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Grup tidak memiliki instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Grup.

(iii) Risiko suku Bunga

Grup menilai risiko suku bunga adalah minimal karena Grup tidak memiliki pembiayaan eksternal pada tanggal 31 Desember 2020. Eksposur tingkat bunga dipantau untuk menjaga risiko yang rendah dan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Grup.

37. Financial risk management

The Group's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risk.

Capital risk management

The Group's objective when maintaining capital is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows, capital expenditures and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. As at December 31, 2020, the Group's capital structure is funded by shareholders' equity.

Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Group's sales and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to the fluctuations in foreign exchange rates.

Refer to Note 34 for detail of monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars.

(ii) Price risk

The Group is exposed to fluctuations in nickel, coal and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, coal and fuel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand. The Group actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of price volatility.

For the year ended December 31, 2020, if the average price of nickel had increased/decreased by 15%, with all other variables held constant, the Group's pre-tax profit would have increased/decreased by US\$114.7 million (full amount).

At December 31, 2020 and 2019, the Group does not have any financial instruments whose value was directly linked to movements of the world nickel price. Therefore, fluctuation of the world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Group's financial instruments.

(iii) Interest rate risk

The Group assesses the interest rate risk as minimal since the Group does not have any external financing as at December 31, 2020. Interest rate exposure is monitored to maintain a low risk and to minimise any negative impact to the Group.

37. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

37. Financial risk management (continued)

(iii) Risiko suku Bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terpengaruh oleh suku bunga.

The following table presents a breakdown of the Group's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

31 Desember/December 31, 2020						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Aset						Assets
Kas dan setara kas	317,959	-	70,723	-	-	388,682
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	30,612	-	30,612
Piutang usaha	-	-	-	-	60,040	60,040
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	2,512	2,512
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	18	18
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	4,321	4,321
Jumlah aset keuangan	317,959	-	70,723	30,612	66,891	486,185
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	(113,095)	(113,095)
Akrual	-	-	-	-	(22,105)	(22,105)
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(2,398)	(2,398)
Liabilitas sewa	-	-	(66)	-	-	(66)
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	(66)	-	(137,598)	(137,664)
31 Desember/December 31, 2019						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Aset						Assets
Kas dan setara kas	139,035	-	110,000	-	-	249,035
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	15,412	-	15,412
Piutang usaha	-	-	-	-	107,295	107,295
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	2,754	2,754
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	58	58
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	4,623	4,623
Jumlah aset keuangan	139,035	-	110,000	15,412	114,730	379,177
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	(97,408)	(97,408)
Akrual	-	-	-	-	(16,327)	(16,327)
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(3,753)	(3,753)
Liabilitas sewa	-	-	(947)	(173)	-	(1,120)
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	(947)	(173)	(117,488)	(118,608)

Pada tanggal 31 Desember 2020, perubahan suku bunga sebesar 0,5% dengan semua variabel lain tetap, tidak akan berdampak signifikan terhadap laba tahun berjalan.

As at December 31, 2020, changes in interest rates by 0.5% with all other variables held constant would not have a significant impact to profit for the year.

37. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

37. Financial risk management (continued)

Risiko kredit

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel Grup dalam *matte*, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan VCL (induk Perseroan) dan SMM yang merupakan dua dari pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan setara kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Grup hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperkecil risiko kredit (lihat Catatan 5).

Credit risk

Credit risk is minimal as the Group's nickel in *matte* is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with VCL (parent company) and SMM, two of the Company's major shareholders. Credit risk also arises from cash and cash equivalents, specifically from cash in banks and time deposits. The Group has a policy to select reputable local and overseas banks to minimise credit risk (refer to Note 5).

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Piutang usaha: Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Trade receivables: Counterparties with external credit rating:
Fitch			Fitch
BBB- (2019: BBB-)	48,389	71,335	BBB- (2019: BBB-)
Japan Credit Rating Agency			Japan Credit Rating Agency
AA- (2019: AA-)	11,651	35,960	AA- (2019: AA-)
Berperingkat	60,040	107,295	Rated

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kas di bank, deposito berjangka dan kas yang di batasi penggunaannya			Cash in bank, time deposits and restricted cash
Moody's			Moody's
Aa3 (2019: Aa3)	107,650	66,098	Aa3 (2019: Aa3)
A1 (2019: A1)	80,399	10,000	A1 (2019: A1)
Ba3 (2019: Ba3)	70,723	55,000	Ba3 (2019: Ba3)
Baa2 (2019: Baa2)	34,411	63,667	Baa2 (2019: Baa2)
A2 (2019: A2)	34,026	38,285	A2 (2019: A2)
Fitch National			Fitch National
AAA (2019: AAA)	92,085	31,397	AAA (2019: AAA)
Berperingkat	419,294	264,447	Rated

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasangkan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah ini mengklasifikasikan liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskontokan.

The table below classifies the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

31 Desember 2020	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	December 31, 2020
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)				
Utang usaha	(113,095)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(22,105)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(2,398)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(788)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Liabilitas sewa	(66)	-	-	-	-	Lease liabilities

37. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

37. Financial risk management (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

December 31, 2019	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(97,408)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(16,327)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,753)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(780)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Liabilitas sewa	(390)	(670)	(120)	-	-	Lease liabilities

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value estimation

Fair value is the price that would be received to sell an asset or the price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at December 31, 2020 and 2019.

38. Aset dan liabilitas kontinjensi

38. Contingent assets and liabilities

a. Perihal lingkungan hidup

a. Environmental matters

Kehutanan

Forestry

Berdasarkan KK Perseroan sebagaimana telah diubah dengan KK 2014 (lihat Catatan 1), Perseroan diberikan semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan pengusahaannya serta semua kewenangan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah KK.

Based on the Company's CoW as amended by the 2014 CoW (refer Note 1), the Company is granted all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorisations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Kehutanan 1999 diterbitkan. Undang-Undang Kehutanan 1999 secara tegas melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

In 1999, the 1999 Forestry Law was proclaimed. The 1999 Forestry Law expressly prohibits open pit mining in protected forests.

Pada bulan Mei 2004, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang mengakui KK Perseroan sebagai salah satu dari 13 perusahaan tambang yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung (sampai dengan berakhirnya izin/kontrak). Selanjutnya pada tahun 2008, Perseroan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk seluruh kawasan hutan yang berada di dalam wilayah KK, dengan tetap mencadangkan dan tidak mengurangi hak-hak Perseroan berdasarkan KK.

In May 2004, the President issued a Presidential Decree which recognises the Company's CoW as one of the 13 mining companies permitted to conduct mining activities in protected forest areas (until the end of the permit/contract). Therefore, in 2008, the Company applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated.

Peraturan kehutanan menetapkan kewajiban tertentu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, antara lain untuk melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan ("PSDH") dan Dana Reboisasi, melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP"), melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan izin pinjam pakai kawasan hutan dan untuk melakukan perlindungan hutan.

Forestry laws and regulations stipulate certain obligations for lend-use permit holders, among others, to pay Forest Resource Charges ("FRC") and Reforestation Funds, to pay non-tax state revenue, to carry out rehabilitation of the watershed area, to carry out empowerment of the community surrounding the lend-use permit area and to conduct forest protection.

Untuk periode bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran PNBP untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR450 juta atau setara dengan AS\$32 ribu (nilai penuh).

For the period from June 2019 to June 2020, the Company has made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR450 million or equivalent to US\$32 thousand (full amount).

Pada 31 Desember 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Sorowako melalui Keputusan No. SK.645/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

On December 31, 2018 the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Sorowako area by virtue of Decree No. 645/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of the watershed area.

38. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Kehutanan (lanjutan)

Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk membayar PNPB di bidang kehutanan secara retroaktif terhitung mulai tahun 2008 (yaitu tahun diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2/2008 yang memperkenalkan pengenaan pendapatan negara bukan pajak terkait izin pinjam pakai kawasan hutan). Kewajiban pembayaran secara retroaktif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Perseroan memiliki jangka waktu satu tahun untuk memenuhi kewajiban pembayaran ini. Nilai pembayaran akan didasarkan pada perhitungan Perseroan (*self-assessment*). Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan, Perseroan telah mengakui IDR169 miliar atau setara dengan AS\$11,2 juta (nilai penuh) beban di laporan keuangan tahun 2018 dan telah melakukan pembayaran di tahun 2019 atas PNPB retroaktif untuk tahun 2008 - 2018. Perseroan juga telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar IDR29 miliar atau setara dengan AS\$2,1 juta (nilai penuh) dan IDR26 miliar atau setara dengan AS\$1,8 juta (nilai penuh) untuk PNPB tahun 2020 dan 2019.

Pada bulan Mei 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Bahodopi melalui Keputusan No. SK.341/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB sehubungan dengan kewajiban pembayaran secara retroaktif terkait izin pinjam pakai kawasan hutan di Sorowako. Menindaklanjuti surat tersebut, Perseroan melakukan pembayaran PNPB pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar IDR37,1 miliar atau setara dengan AS\$2,6 juta (nilai penuh) yang diakui sebagai beban di tahun berjalan.

Lingkungan hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dari Pemerintah pada tahun 2008 yang mencakup seluruh area yang saat ini diusahakan di wilayah KK Sulawesi Selatan. Persetujuan AMDAL tersebut secara otomatis dianggap sebagai Izin Lingkungan bagi Perseroan. Untuk Blok Bahodopi, Perseroan mendapatkan Izin Lingkungan pada September 2013. Untuk Blok Pomalaa, Perseroan mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL pada tahun 2005 dengan lingkup penambangan terbatas dan pada tahun 2020 untuk menunjang komitmen investasi Perseroan di provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada bulan Desember 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Izin Lingkungan dan persetujuan atas addendum AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako.

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") mengharuskan seluruh perusahaan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam laporan keuangan.

38. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Environmental matters (continued)

Forestry (continued)

In addition, the Company was also required to pay the forestry non-tax state revenue retroactively starting from 2008 (i.e. since the issuance date of Government Regulation No. 2/2008 introducing non-tax state revenue related to lend-use permits). This retroactive payment obligation is in accordance with Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 regarding Guidance for Lend Use of Forest Area. The Company had a one-year period to fulfil this payment obligation. The payment amount was to be based on a self-assessment basis. Based on the Company's self-assessment, the Company has recognised expense of IDR169 billion or equivalent to US\$11.2 million (full amount) in the 2018 financial statements and has made payments in 2019 for the retroactive forestry non-tax state revenue for the years 2008 - 2018. The Company also made payments of IDR 29 billion or equivalent to US\$2.1 million (full amount) and IDR26 billion or equivalent to US\$1.8 million (full amount) for the forestry non-tax state revenue for the years 2020 and 2019, respectively.

In May 2019, the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Bahodopi area by virtue of Decree No. 341/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on the working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of the watershed area.

On August 28, 2020, the Ministry of Environment and Forestry issued a non-tax state revenue underpayment letter with respect to the Company's retroactive payment obligation for the Sorowako lend-use permit. Responding to such letter, the Company made the non-tax state revenue payment on August 31, 2020 in the amount of IDR37.1 billion or equivalent to US\$2.6 million (full amount) which is recognised as an expense in the current year.

Environment

Based on Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses, all companies are required to obtain an Environmental License as a pre-requisite for their business license.

The Company has already obtained an approved Environmental Impact Assessment ("AMDAL") from the Government in 2008 covering all areas that are currently being operated in the CoW area in South Sulawesi. The AMDAL approval is automatically deemed as the Company's Environmental License. For the Bahodopi Block, the Company obtained its Environmental License in September 2013. For the Pomalaa Block, the Company obtained AMDAL approval in 2005 with a limited mine scope and in 2020 to support the Company's investment commitment in the Southeast Sulawesi province.

In December 2017, the Ministry of Environment and Forestry issued an Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activities in the Sorowako Block.

b. Mine reclamation and mine closure

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 of 2010 ("GR 78/2010"). The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the financial statements.

38. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") menerbitkan Peraturan No. 07/2014 ("Peraturan Menteri No. 07/2014"). Berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, salah satu persyaratan untuk dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi adalah terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya setidaknya 40% dari total saham yang dimiliki. Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi mulai tahun 2015.

Pada tanggal laporan ini, total bank garansi yang ditempatkan sebagai deposito berjangka oleh Perseroan sebagai jaminan reklamasi sesuai dengan Peraturan Menteri No.07/2014 adalah sebesar AS\$7,1 juta (nilai penuh) untuk Blok Sorowako dan AS\$260 ribu (nilai penuh) untuk Blok Pomalaa.

Pada tanggal 6 Januari 2015, KESDM menerbitkan persetujuan atas rencana penutupan tambang Perseroan. Jumlah estimasi biaya penutupan tambang disetujui sebesar AS\$69,9 juta (nilai penuh), yang akan ditempatkan secara bertahap sebagai deposito berjangka mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dengan pelaksanaan komitmen investasi berdasarkan KK 2014, rencana penutupan tambang Perseroan akan berubah secara signifikan dibanding dengan rencana penutupan tambang yang telah diajukan dan disetujui oleh KESDM, baik dari aspek jumlah jaminan yang dibutuhkan maupun waktu penempatan.

Perseroan telah menempatkan jaminan penutupan tambang untuk 2017 sampai dengan 2020 dalam bentuk deposito berjangka masing-masing sebesar AS\$1,4 juta (nilai penuh), AS\$3,8 juta (nilai penuh), AS\$6,6 juta (nilai penuh) dan AS\$11,4 juta (nilai penuh).

Dengan diperolehnya Izin Lingkungan dan persetujuan atas perubahan AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako, pada bulan Desember 2018, Perseroan mengajukan perubahan atas rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh KESDM pada tahun 2015. Rencana penutupan tambang ini dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 (yang mencabut Peraturan Menteri No. 07/2014) dan Keputusan Menteri ESDM No.1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Penambangan yang Baik. Dalam hal perubahan ini disetujui oleh KESDM, maka jaminan penutupan tambang yang telah ditempatkan oleh Perseroan akan disesuaikan kembali. Namun demikian, rencana penutupan tambang yang baru ini belum memperoleh persetujuan dari KESDM. Oleh karenanya, Perseroan melanjutkan untuk memenuhi kewajiban penutupan tambang sesuai dengan rencana penutupan tambang

c. Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dan perambahan

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat Izin Usaha Pertambangan ("IUP") pihak ketiga yang tumpang tindih di dalam wilayah KK Perseroan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat terkini dari KESDM, KESDM mengkonfirmasi bahwa tiga dari empat IUP yang tumpang tindih dengan wilayah KK Perseroan telah dinyatakan *non-clean and clear* berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM dan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 15 November 2018 dan telah dinyatakan dicabut/berakhir. Sedangkan satu IUP telah dinyatakan *non-clean and clear*, namun masih menunggu proses pencabutan IUP.

Sementara tidak terdapat tumpang tindih area pertambangan di dalam Wilayah KK Perseroan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa perambahan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dalam bentuk perkebunan dan bangunan konstruksi temporer. Pada saat ini, perambahan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

Untuk mengatasi masalah perambahan di dalam wilayah KK Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan KESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah.

38. Contingent assets and liabilities (continued)

b. Mine reclamation and mine closure (continued)

On February 28, 2014, the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") issued Regulation No. 07/2014 ("Ministerial Regulation No. 07/2014"). Based on Ministerial Regulation No. 07/2014, one of the requirements for placing a reclamation guarantee in the form of accounting reserve is to be registered on the Indonesia Stock Exchange with a free float of at least 40% of its shares. In order to fulfil the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, the Company adjusted the form of its reclamation guarantee from an accounting reserve to a bank guarantee in 2015.

As at the date of this report, the total bank guarantee placed as time deposits by the Company as reclamation guarantees in accordance with Ministerial Regulation No.07/2014 is US\$7.1 million (full amount) for Sorowako Block and US\$260 thousand (full amount) for Pomalaa Block.

On January 6, 2015, the MEMR issued its approval of the Company's mine closure plan. The total estimated cost for the mine closure is in the amount of US\$69.9 million (full amount), which will be placed gradually in time deposits starting from 2017 up to 2023. By the implementation of investment commitments under the 2014 CoW, the Company's mine closure plan will change significantly compared to the mine closure plan that has been submitted to and approved by the MEMR, both in the amount and the period for the guarantee placement.

The Company has placed mine closure guarantees for 2017 up to 2020 in the form of time deposits in the amount of US\$1.4 million (full amount), US\$3.8 million (full amount), US\$6.6 million (full amount) and US\$11.4 million, respectively.

With the issuance of the Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activity in the Sorowako Block, in December 2018, the Company submitted a revision to the mine closure plan that was approved by the MEMR in 2015. This mine closure plan was prepared in accordance with MEMR Regulation No. 26/2018 (which revoked Ministerial Regulation No. 07/2014) and MEMR Decree No.1827/K/30/MEM/2018 on Guidance for the Implementation of Good Mining Practices. If the revision is approved, the mine closure guarantee that has been placed by the Company will be adjusted. This new mine closure plan, however, has not yet been approved by the MEMR. As such, the Company continues to fulfill the mine closure obligation in accordance with the 2015 mine closure plan.

c. Overlapping "Izin Usaha Pertambangan" and encroachment

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party Mining Business Licences (*Izin Usaha Pertambangan* - "IUP") that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi. Based on a letter from the MEMR, the MEMR confirmed that three out of four IUPs that overlapped the Company's CoW area have been declared non-clean and clear based on the Minutes of Reconciliation between the Directorate General of Mineral and Coal of the MEMR and the Central Sulawesi Province dated November 15, 2018 and have been declared revoked or expired. The other IUP has been declared non-clean and clear, however is still awaiting IUP revocation process.

While there is no third party mining area overlapping the Company's CoW area in South Sulawesi and Southeast Sulawesi, there have been some community or individual encroachment in the form of plantations and temporary constructions. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy.

To address the issue of encroachment on the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment and Forestry and Local Governments.

38. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

d. Amandemen KK

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan menandatangani amandemen KK sebagai hasil kesepakatan renegosiasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Pertambangan 2009. KK 2014 meliputi perubahan-perubahan prinsip sebagai berikut:

- Perseroan tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya. Renegosiasi ini mencerminkan luasan lahan yang memadai untuk keperluan investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
- Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata-rata nikel LME bulan sebelumnya sama atau lebih besar dari AS\$21.000/ton.
- Kewajiban bagi Perseroan untuk mendivestasikan tambahan 20% saham kepada peserta Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan bulan Oktober 2019.
- Perseroan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan Pemerintah.

Selain perubahan-perubahan utama di atas, KK 2014 juga mengatur komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Di bawah ini adalah ringkasan dari komitmen investasi Perseroan berdasarkan KK 2014.

Di Sulawesi Selatan, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih di fasilitas Perseroan di Sorowako.

Di Sulawesi Tenggara, Perseroan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembangunan suatu fasilitas pengolahan dan pemurnian sebagai bagian dari suatu joint venture, bersama dengan infrastruktur pendukungnya.

Jangka waktu Perseroan untuk memulai kegiatan konstruksi untuk setiap komitmen investasi bergantung pada diterimanya semua perizinan/persetujuan dan dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan. Selain itu, komitmen investasi Sulawesi Tengah dan Tenggara dapat dilakukan secara independen atau sebagai bagian dari suatu *joint venture* (usaha patungan).

Di tahun 2019, Perseroan mendirikan dua entitas anak sebagai suatu tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara (lihat Catatan 1).

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, upaya satu-satunya Pemerintah (*sole remedy*) atas hal tersebut adalah pelepasan atas wilayah KK tertentu yang berdampak sebagaimana ditetapkan dalam KK 2014.

e. Paket peraturan pertambangan

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan paket peraturan pertambangan baru.

Ketentuan utama dari peraturan-peraturan baru yang berpotensi memiliki dampak terhadap Perseroan di masa depan diuraikan sebagai berikut:

- Divestasi: IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") dalam rangka penanaman modal asing tunduk pada kewajiban divestasi sebesar 51%.
- Harga patokan mineral: Pemegang IUP/IUPK wajib berpedoman pada harga patokan mineral dalam menjual logam.

Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir dalam amandemen KK (lihat Catatan 38d), Perseroan merujuk kepada peraturan tersebut di atas hanya jika KK 2014 tidak mengatur hal dimaksud.

f. Tuntutan hukum

- a. Program saving plan karyawan Perseroan dikelola oleh dua perusahaan asuransi, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ("WA") dan PT Central Asia Raya. Keduanya merupakan perusahaan swasta nasional dan Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan keduanya sejak bulan Desember 2017 untuk jangka waktu tiga tahun (yang berakhir di bulan Desember 2020).

Karena adanya kekhawatiran dari komite pensiun Perseroan terkait keberlangsungan usaha WA, dan untuk tujuan mengamankan dana *saving plan* yang dikelola oleh WA sekitar IDR220 miliar atau setara dengan AS\$14,8 juta (nilai penuh), komite pensiun Perseroan merekomendasikan untuk mengakhiri perjanjian dengan WA.

38. Contingent assets and liabilities (continued)

d. CoW amendment

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment to the CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law. The 2014 CoW includes the following in principal changes:

- The Company can retain areas required to support its operations. This represents a renegotiated land package that is sufficient to support the Company's investments and long-term growth plans.
- An agreed royalty rate of 2% of sales escalating to 3% if the average LME price for nickel is greater than or equal to US\$21,000/ton in the prior month.
- A requirement for the Company to divest a further 20% of the Company's shares to Indonesian participants. The process of divestment will be conducted by October 2019.
- The Company can apply to continue its operations for two additional periods of ten years, in the form of an operating license, subject to the Government's approval.

In addition to the above mentioned major changes, the 2014 CoW also outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. Below is a summary of the Company's investment commitments under the 2014 CoW.

In South Sulawesi, the Company commits to implementing an investment program to expand the ore processing and refining capacity at the Company's facility in Sorowako.

In Southeast Sulawesi, the Company is committed to the development and construction of a processing and refining facility as part of a joint venture, together with supporting infrastructure.

The timeline for the Company to commence construction in respect of each investment undertaking is subject to the Company's receipt of all requisite licenses/approvals and consideration of feasibility and environmental studies. Further, the Central and Southeast Sulawesi undertakings may be undertaken independently or as part of a joint venture.

In 2019, the Company established two subsidiaries as a milestone in the implementation of the Company's investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi Provinces (refer to Note 1).

In the event that the Company does not fulfil the investment commitments as set out above, the remedy of the Government in this respect is the relinquishment of the affected area as defined in the 2014 CoW.

e. Mining regulation package

In 2017, the Government issued a package of new mining regulations.

The highlights of the new regulations that may have impacts on the Company in the future are outlined below:

- Divestment: Foreign direct investment IUP/Special Mining Business Licence (*Izin Usaha Pertambangan Khusus* – "IUPK") holders are subject to 51% divestment requirement.
- Benchmark Price: IUP/IUPK holders must use a defined benchmark price as the guidance in selling minerals.

As divestment is one of the CoW amendment items (refer to Note 38d), the Company will refer to the above regulations only if the 2014 CoW is silent on the matter.

f. Litigation

- a. The Company's employee savings plan program is currently managed by two insurance companies, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ("WA") and PT Central Asia Raya. Both are Indonesian private companies, and the Company has engaged them since December 2017 for a three-year agreement (that ended in December 2020).

As there are concerns from the Company's pension committee on WA's business continuity, and also for the purpose of securing the savings plan funds held with them of approximately IDR220 billion or equivalent to US\$14.8 million (full amount), the Company's pension committee recommended termination of the current agreement with WA.

38. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

f. Tuntutan hukum (lanjutan)

Pemberitahuan pengakhiran perjanjian dikirimkan pada akhir bulan Februari dan berlaku efektif pada tanggal 27 Maret 2020, dan kewajiban pembayaran atas seluruh kewajiban WA diharapkan untuk dilaksanakan paling lambat pada tanggal 8 April 2020. WA telah menyetujui pengakhiran perjanjian, namun demikian WA menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya karena rekening WA sedang dibekukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Karena pembayaran belum diterima, Perseroan telah melakukan upaya penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian dan melakukan arbitrase berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta. Perseroan yakin bahwa perkara ini akan diselesaikan tanpa dampak yang material pada posisi keuangan dan arus kas Perseroan.

- b. Pada akhir tahun 2019, terdapat perkara gugatan Tata Usaha Negara ("TUN") antara CV Bumi Nikel Bungku ("BNB") melawan Bupati Morowali dengan Nomor Perkara: 15/G/2019/PTUN.PL. di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ("Perkara No. 15/2019").

Perkara No.15/2019 ini terkait dengan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan ("IUP") milik BNB oleh Bupati Morowali pada tahun 2014 karena IUP tersebut tumpang tindih dengan Wilayah KK Perseroan di Blok Bahodopi. Perseroan kemudian mengajukan diri sebagai Pihak Tergugat II Intervensi untuk membela kepentingan Perseroan.

Perkara ini sudah diputus pada tingkat PTUN dan PPTUN dan Perseroan telah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Apabila Kasasi TUN dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap akan dapat berakibat tumpang tindih dengan sebagian Wilayah KK Perseroan di Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah. Perseroan yakin perkara ini akan diselesaikan tanpa dampak yang material pada operasi Perseroan.

g. Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah

Bank Indonesia ("BI") telah mengeluarkan surat No. 17/2430/DKSP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyetujui usulan Perseroan untuk tetap menggunakan mata uang selain Rupiah dalam transaksi-transaksinya sampai dengan berakhirnya KK. BI meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak yang transaksinya dapat menggunakan Rupiah dan melaporkan hasil penyesuaian yang telah dilakukan Perseroan kepada BI setiap enam bulan.

h. Peraturan ESDM tentang kewajiban tata batas

Pada bulan Oktober 2015, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 33 Tahun 2015 yang mewajibkan pemegang IUP dan KK untuk melakukan tata batas wilayah. Perseroan, sebagai pemegang KK, memiliki jangka waktu enam bulan untuk melakukan kewajiban tersebut, terhitung sejak tanggal diterbitkannya peraturan. Pada bulan April 2018, kewajiban ini diubah melalui peraturan ESDM No. 25/2018. Berdasarkan peraturan yang baru ini, kewajiban untuk melakukan tata batas tidak berlaku bagi seluruh wilayah KK, namun hanya wilayah yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Saat ini, Perseroan belum dapat memenuhi Peraturan ini, mengingat sebagian besar wilayah KK Perseroan berada di dalam kawasan hutan dan Perseroan masih menunggu penetapan areal kerja untuk atas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, Perseroan telah melakukan pemasangan tanda batas pada wilayah non-kawasan hutan secara bertahap dan Perseroan senantiasa menyampaikan laporan kemajuan kepada KESDM.

i. Peraturan Pemerintah No. 1/2019

Sebagai implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah ke-XVI, pada 10 Januari 2019, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/3/PBI/2019 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1523/2019. Peraturan ini menetapkan pengaturan mengenai penempatan dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam dari Indonesia (termasuk nikel matte). Berdasarkan peraturan di atas, Perseroan wajib untuk menempatkan devisa hasil ekspor melalui rekening khusus pada bank devisa di Indonesia dan hanya dapat dikirim ke luar negeri untuk tujuan tertentu. Mempertimbangkan bahwa peraturan baru ini memiliki dampak terhadap SEFA antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk Proyek Karebbe, yang berakhir pada bulan Agustus 2019, Perseroan telah melakukan pelunasan awal atas fasilitas tersebut.

38. Contingent assets and liabilities (continued)

f. Litigation (continued)

Notice of termination of the agreement was sent at the end of February 2020 and was effective as of March 27, 2020, and payment of all obligations by WA was expected to be made by April 8, 2020. WA have agreed to the termination, however, they are claiming that they will have difficulty in delivering their obligation due to their bank accounts being frozen by the State Attorney of the Republic of Indonesia.

Since payment has not been received, the Company has invoked the dispute resolution mechanism under the agreement and has commenced an arbitration proceeding under the Indonesian Board of Arbitration (BANI) rules in Jakarta. The Company believes that this matter will be resolved without material impact to the Company's financial position or cash flows.

- b. In late 2019, CV Bumi Nikel Bungku ("BNB") filed a State Administrative claim against Bupati Morowali under case No. 15/G/2019/PTUN.PL at the State Administrative Court (PTUN) of Palu ("Case No. 15/2019").

This Case No.15 of 2019 is related to the revocation of BNB's Mining Permit ("IUP") in 2014 because the IUP overlaps with the Company's CoW area in Bahodopi Block, Central Sulawesi. Therefore, the Company filed an intervention claim in the case and became Intervention Party II to protect the Company's interest.

This case has been decided in the State Administrative Court and the High State Administrative Court and the Company has filed an appeal to the Supreme Court.

If the State Administrative claim is granted, there will be a partial overlap with the Company's CoW area in Bahodopi Block, Central Sulawesi. The Company believes that this litigation will be resolved without material impact to the Company's operations.

g. Bank Indonesia regulation on obligation to use Rupiah

Bank Indonesia ("BI") has issued letter No. 17/2430/DKSP dated October 30, 2015 which essentially approved the Company's proposal to continue using a currency other than Rupiah in its transactions until the expiry of the CoW. BI asked the Company to adjust its contracts that can use Rupiah and to provide BI with a report on the adjustments the Company has made every six months.

h. MEMR regulation on boundary markings

In October 2015, the MEMR issued Regulation No. 33/2015 which imposes the obligation for IUP and CoW holders to establish geographic boundary markings. The Company, as a CoW holder, has six months to comply with the Regulation from the date of promulgation. In April 2018, this obligation was revised by MEMR regulation No. 25/2018. Based on this new regulation, the obligation to establish geographic boundary markings does not apply to the whole CoW area, but only to areas which fulfil the stipulated criteria.

At present, the Company is not able to fully comply with the Regulation, considering the majority of the Company's CoW area is located inside forest areas and the Company is still awaiting the issuance of the working area determination for the forestry land-use permits for production operation activities from the Ministry of Environment and Forestry. However, the Company has started to gradually establish the boundary marking in the non-forestry area and the Company reports the progress to the MEMR.

i. Government Regulation No. 1/2019

As an implementation of the Government's 16th Economic Policy Package, on January 10, 2019, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2019 on Export Proceeds from Natural Resources Development, Management and/or Processing Activities, as further implemented under Bank of Indonesia Regulation No. 21/3/PBI/2019 and Minister of Finance Decree No. 1523/2019. This regulation sets out the arrangements for the deposit and use of proceeds from the export of natural resources from Indonesia. Based on the above regulations, the Company's export proceeds must now be parked onshore within a specific account maintained with a foreign exchange bank in Indonesia and can only be sent offshore for specific purposes. Considering that this new regulation will impact the SEFA between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe Project, which was to expire in August 2019, the Company made early repayment of the facility.

38. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

j. Divestasi

Pada tanggal 19 Juni 2020, VCL dan SMM telah menandatangani perjanjian definitif pembelian saham untuk penjualan 20% saham di Perseroan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum), sesuai dengan kewajiban divestasi Perseroan berdasarkan KK 2014. Transaksi ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2020 ini.

Sebagai bagian dari perjanjian definitif, VCL, SMM, Inalum dan Perseroan menandatangani Perjanjian Kerangka *Offtake* (Pembelian dan Pengambilan), yang menetapkan syarat dan ketentuan bagi Perseroan untuk dapat menjual dan bagi Inalum untuk dapat membeli produk dari fasilitas pengolahan dan pemurnian Perseroan di Sorowako.

Pada tanggal 7 Oktober 2020, VCL dan SMM telah menyelesaikan Transaksi, yang menyebabkan pengalihan 20% kepemilikan saham di Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia, kepada pembeli yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni Inalum. Hal ini merupakan pemenuhan lebih lanjut terhadap kewajiban divestasi Perseroan berdasarkan 2014. Berdasarkan KK 2014, divestasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan untuk melanjutkan operasinya setelah tahun 2025.

Penyelesaian divestasi ini menempatkan Perseroan pada posisi yang tepat untuk berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan memperkuat komitmen jangka panjang Perseroan terhadap pengolahan sumber daya nikel guna peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, dan pemberdayaan lokal di negara ini.

Penjualan dan pengalihan 20% saham berjumlah IDR5.524.604.331.100 terdiri dari 1.987.267.745 saham. Total 20% saham yang dijual dan dialihkan kepada Inalum masing-masing terdiri dari 14,9% dan 5,1% dari kepemilikan saham VCL dan SMM di Perseroan. Setelah menyelesaikan Transaksi, VCL memiliki 44,3% saham dan SMM memiliki 15,0% saham di Perseroan atau total sebesar 59,3% saham.

k. Penanaman Modal pada Anak Perusahaan Perseroan

Pada bulan April 2020, Perseroan melakukan penyeteroran modal tambahan sebesar IDR119,9 miliar atau setara dengan AS\$7,6 juta (nilai penuh) (dengan nilai tukar pada tanggal transaksi) kepada anak perusahaannya, PT Kolaka Nickel Indonesia. Untuk mempertahankan kepemilikan 0,1%, VCL menyeterorkan modal tambahan sejumlah IDR120 juta atau setara dengan AS\$8,5 ribu (nilai penuh).

l. Akuisisi Pelabuhan oleh PT Kolaka Nickel Indonesia

Pada bulan April 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan PT Sumber Setia Budi untuk akuisisi pelabuhan dan tanah untuk mendukung komitmen investasi Perseroan di Sulawesi Tenggara berdasarkan Kontrak Karya. Perjanjian Pembelian Aset kemudian dinovasi oleh Perseroan kepada PT Kolaka Nickel Indonesia. Sebagai konsekuensinya, PT Kolaka Nickel Indonesia kini mengambilalih semua hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset. PT Kolaka Nickel Indonesia telah melakukan pembayaran harga beli sebesar IDR95 miliar atau setara dengan AS\$6,7 juta (nilai penuh) kepada PT Sumber Setia Budi.

m. Peraturan ESDM No. 7 Tahun 2020

Pada bulan Maret, KESDM mengeluarkan Peraturan No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mencabut Peraturan No. 11/2018. Peraturan ini mengatur tata cara untuk konversi kontrak karya menjadi IUPK, divestasi dan pengolahan dalam negeri. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan pada aspek-aspek ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Perubahan peraturan yang berdampak pada Perseroan adalah persyaratan untuk perubahan direksi dan dewan komisaris. Di dalam peraturan ini, persetujuan terlebih dahulu KESDM tidak lagi diperlukan. Setiap perubahan terhadap susunan Direksi dan dewan Komisaris harus dilaporkan kepada KESDM setelah penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

38. Contingent assets and liabilities (continued)

j. Divestment

On June 19, 2020 VCL and SMM signed a definitive share purchase agreement for the sale of a 20% stake in the Company to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ("Inalum"), in compliance with the Company's divestment obligation under the 2014 CoW. Completion of the transaction was expected by the end of 2020.

As part of the definitive agreement, VCL, SMM, Inalum and the Company signed an Offtake Framework Agreement, setting out the terms and conditions upon which the Company may sell and Inalum may purchase product from the Company's processing and refining facility in Sorowako.

On October 7, 2020, VCL and SMM have completed the Transaction, resulting in the transfer of an aggregate of 20% of their shareholding in the Company, through the Indonesian Stock Exchange, to the buyer nominated by the Government of the Republic of Indonesia, Inalum. This further satisfies the Company's divestment obligation under the 2014 CoW. Based on the 2014 CoW, a divestment process is one of the obligations that the Company needs to comply with to extend its operation beyond 2025.

The completion of this Transaction and divestment obligation positions the Company well to continue contributing to the development of Indonesia and reinforces the Company's long-standing commitment to value-added processing of nickel resources, sustainability and local empowerment in the country.

The sale and transfer of the 20% shareholding amounted to IDR 5,524,604,331,100 comprising of 1,987,267,745 shares. The total 20% shareholding sold and transferred to Inalum represents 14.9% and 5.1% of VCL's and SMM's respective shareholding in the Company. Upon completion of the Transaction, VCL holds 44.3% shares and SMM holds 15.0% shares in the Company, or a total of 59.3% shares.

k. Capital Investment to the Company's Subsidiary

In April 2020, the Company injected an additional capital of IDR119.9 billion or equivalent to US\$7.6 million (full amount) (at the exchange rate at the date of the transaction) to its subsidiary, PT Kolaka Nickel Indonesia. To maintain the 0.1% ownership, VCL injected an additional capital of IDR120 million or equivalent to US\$8.5 thousand (full amount).

l. Port Acquisition by PT Kolaka Nickel Indonesia

In April 2020, the Company signed an Asset Purchase Agreement with PT Sumber Setia Budi for the acquisition of a port and land to support the Company's investment commitment in Southeast Sulawesi under the Contract of Work. The Asset Purchase Agreement was then novated by the Company to PT Kolaka Nickel Indonesia. Consequently, PT Kolaka Nickel Indonesia now assumes all rights and obligations of the Company under the Asset Purchase Agreement. PT Kolaka Nickel Indonesia has paid a purchase price of IDR95 billion or equivalent to US\$6.7 million (full amount) to PT Sumber Setia Budi.

m. MEMR Regulation No. 7 of 2020

In March, the MEMR issued Regulation No. 7 of 2020 on the Granting of Area, Licenses and Reporting in Mineral and Coal Mining Business Activities, which revoked Regulation No. 11/2018. This Regulation governs the procedure for conversion of contracts of work into an IUPK, divestment and domestic processing. However, there are no significant changes to these aspects as compared to the previous regulation. The change in the regulation which impacts the Company is the requirement for change of board of directors and board of commissioners. Under this regulation, prior MEMR approval is no longer required. Any changes to the composition of the board of directors and the board of commissioners shall be reported to the MEMR following acceptance of notification from the Ministry of Law and Human Rights.

38. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

38. Contingent assets and liabilities (continued)

n. Perubahan terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

n. Amendment to the Mineral and Coal Mining Law

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan kajian awal Perseroan, perubahan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasi Perseroan, mengingat hal-hal prinsip terkait operasi Perseroan telah diatur dalam KK 2014. Namun demikian, undang-undang ini mengatur beberapa kewajiban finansial tambahan bagi perusahaan pertambangan, termasuk dana ketahanan cadangan mineral dan kewajiban untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

On June 10, 2020, the government issued Law No. 3 of 2020 on the Amendment to Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Based on the Company's preliminary review, the amendment does not provide significant impacts on the Company's operations, as most of the Company's in principle matters have been covered in its 2014 CoW. The law, however, provides some additional financial obligation for mining companies, including mineral reserve resilience fund and continued exploration obligation. Details of these obligations are to be further regulated in a government regulation.

o. Undang-Undang Cipta Kerja

o. Job Creation Law

Pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyetujui Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) - yang biasa dikenal dengan "Undang-Undang Omnibus", yang kemudian ditandatangani Presiden pada 2 November 2020. Undang-Undang Omnibus mengamandemen lebih dari 75 undang-undang, dan mengharuskan pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih dari 30 peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang harus dikeluarkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan Undang-Undang Omnibus. Undang-Undang Omnibus berfokus pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia (diantaranya, menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas, dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan). Meskipun pengaturan secara detail akan diatur dalam peraturan pelaksanaan, diharapkan bahwa peraturan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan, baik untuk kegiatan operasional yang sudah ada maupun untuk investasi baru Perseroan. Di Februari 2021, Pemerintah secara resmi menerbitkan 49 Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Omnibus.

On October 5, 2020, the Indonesian House of Representatives ("DPR") approved the job creation law - commonly known as the "Omnibus Law", which was later signed by the President on November 2, 2020. The Omnibus Law amended more than 75 current laws and will require the central government to issue more than 30 government regulations and other implementing regulations which must be issued within three months of its enactment. The Omnibus Law focuses on increasing the ease of doing business in Indonesia (e.g., simplifying licensing processes, simplifying land acquisition processes, formalizing economic zones, providing more incentives for free trade zones, and amending the labor law). While the details will be provided in the implementing regulations, it is expected that these regulations will provide positive impacts on the Company, both for the existing operations and for the new investments. In February 2021, the Government officially enacted 49 implementing regulations of the Omnibus Law.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup masih melakukan tinjauan dampak dari Undang-Undang Omnibus dan peraturan pelaksanaannya.

As at the date of these consolidated financial statements, the Group is still assessing the impact of the Omnibus Law and its implementing regulations

39. Informasi tambahan untuk laporan arus kas

39. Supplementary information for statements of cash flows

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

Significant activities not affecting cash flows:

31 Desember	2020	2019	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang dan akrual	41,861	33,375	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables and accruals
Penambahan aset tetap dari provisi penghentian pengoperasian aset	11,436	8,124	Addition of fixed assets from provision for asset retirement

40. Informasi komparatif

40. Comparative information

Beberapa akun di dalam informasi komparatif telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan presentasi laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Certain accounts in the comparative information have been reclassified to conform with the current period presentation of consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2020.

	31 Desember/December 31, 2019			
	Disajikan sebelumnya/ Previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification	
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)		
Beban pokok pendapatan	(665,558)	1,235	(664,323)	Cost of revenue
Biaya keuangan	(3,912)	(1,235)	(5,147)	Finance costs